



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT
INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS**

**RUDY KASIMAN
120180101008**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	:	Rudy Kasiman
NIM	:	120130101008
Program Studi	:	Strategi Perang Semesta
Fakultas	:	Strategi Pertahanan
Judul Tesis	:	STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rudy Kasiman
NIM : 120130101008
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Judul Tesis :

STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH
PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA
DI KABUPATEN SAMBAS

Pembimbing I



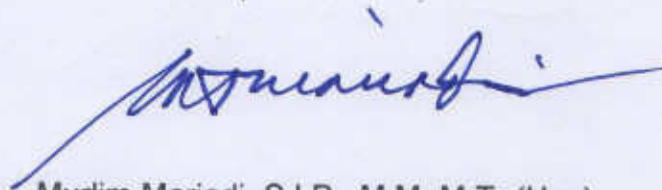
Dr. Hipdizan, S. Adm., M.Si.
Mayor Jenderal TNI

Pembimbing II



Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Strategi Pertahanan



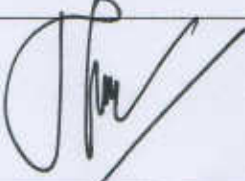

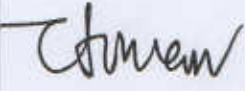
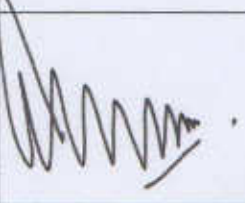

Murlim Mariadi, S.I.P., M.M., M.Tr (Han)
Mayor Jenderal TNI

Tanggal: September 2019

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Dr. Hipdizah, S. Adm., M.Si. Mayor Jenderal TNI		
2.	Pembimbing II: Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M. Brigadir Jenderal TNI		
3.	Reviewer I: Dr. Drs. TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S. Mayor Jenderal TNI (Purn)		
4.	Reviewer II: Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M. Laksamana Pertama TNI		
5.	Reviewer III: Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. Letnan Kolonel Inf NRP 34148		

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Rudy Kasiman
 NIM : 120130101008
 Program Studi : Strategi Perang Semesta
 Fakultas : Strategi Pertahanan
 Judul Tesis :
STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH
 PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA
 DI KABUPATEN SAMBAS

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Dr. Hipdizah, S. Adm., M.Si. Mayor Jenderal TNI		11/10/19
2.	Pembimbing II: Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M. Brigadir Jenderal TNI		6/10/19
3.	Reviewer I: Dr. Drs. TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S. Mayor Jenderal TNI (Purn)		10/10/19
4.	Reviewer II: Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M. Laksamana Pertama TNI		7/10/2019
5.	Reviewer III: Dr. Triyoga Budi Prasetyo, M.Si. Letnan Kolonel Inf NRP 34148		7/10/2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, September 2019

Rudy Kasiman

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, September 2019



Rudy Kasiman

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul: “Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP, selaku Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.
2. Bapak Mayor Jenderal TNI Murlim Mariadi, S.IP., M.M., M.Tr (Han), selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.
3. Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si. dan Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab selaku Pangdam XII/Tpr sekaligus selaku Pangkoops Pamantas Kodam XII/Tpr beserta segenap jajaran Kodam XII/Tpr.
5. Bapak Kolonel Pas Dr. Drs. Bastari, M.Pd., M.Si (Han), selaku Sesprodi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.
6. Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S., Bapak Laksma TNI Dr. Drs. I Wayan Warka, M.M., dan Bapak Letkol Inf. Dr. Triyoga

Budi Prasetyo, M.Si., selaku Reviewer yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kebaikan penyusunan tesis ini.

7. Bapak Atbah Romin Suhaili selaku Bupati Sambas beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Sambas.
8. Komandan Brigif 19/Khatulistiwa beserta jajaran Brigif 19/Khatulistiwa.
9. Bapak AKBP Permadi Syahids Putra, S.Ik., M.H.selaku Kapolres Sambas beserta jajaran.
10. Kepala Kantor Imigrasi Sambas beserta jajaran.
11. Kepala PLBN Aruk beserta jajaran stakeholders di PLBN Aruk.
12. Komandan SSK II Yonif Mekanis 643/Wns beserta seluruh anggota Pos Pamtas yang bertugas mengamankan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas.
13. Istri saya beserta putra-putri tercinta: Bunda Dianty Grace Rachman, SH, Ananda Daffa Naufal Rachman dan Ananda Dyandra Nabila Rachman.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari tiada gading yang tak retak, bahwa tesis ini pun masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait, dalam upaya mengelola kawasan perbatasan darat antar negara menjadi berandanya NKRI.

Bogor, Oktober 2019

Rudy Kasiman

ABSTRAK

STRATEGI PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS

RUDY KASIMAN

Penelitian ini menganalisis Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia oleh SSK II Yonif 643/Wanara Sakti di Kabupaten Sambas khususnya yang diterapkan di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia (Serawak) dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Penelitian ini fokus mengidentifikasi hakekat ancaman keamanan, dan menganalisis strategi pengamanan yang diterapkan Satgas Pamtas di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia khususnya yang berada di Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh. Penelitian dilakukan dengan melibatkan aparatur sipil, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa di daerah tersebut serta masyarakat desa setempat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya observasi, analisis dokumen, kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi ancaman militer adalah pelanggaran wilayah perbatasan yang dilatar belakangi persoalan patok batas dan OBP, sedangkan ancaman non militer yang potensi terjadi di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas adalah berbagai kegiatan ilegal, pencurian sumber daya alam, *human trafficking*, *illegal trading*/penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba, serta dapat dikata strategi belum cukup efektif dan belum optimal karena strategi yang diimplementasikan kurang proporsional, kurang seimbang, dan kurang terkoordinasi dalam *ends*, *ways* dan *means*, sehingga timbul *risk* yaitu banyaknya kegiatan ilegal terjadi di perbatasan sehingga menyarankan bahwa untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, maka perlu kiranya memprioritaskan percepatan penyelesaian masalah OBP dan implementasi strategi pengamanan yang proporsional, seimbang dan terkoordinasi, serta bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya yang berada di daerah.

Kata Kunci: Strategi, Pengamanan, Perbatasan Darat, Ancaman

ABSTRACT

STRATEGY FOR SAFEGUARDING THE INDONESIA-MALAYSIA LAND BORDER AREA IN SAMBAS DISTRICT

RUDY KASIMAN

This study analyzes the Security Strategy of the Indonesia-Malaysia Land Border Area by SSK II Infantry Battalion 643/Wanara Sakti in Sambas Regency, especially those implemented in Sajingan Besar and Paloh Subdistricts whose territories border directly with neighboring countries, namely Malaysia (Sarawak), in order to uphold state sovereignty, territorial integrity and the safety all Indonesians. This study focuses on identifying the nature of security threats, and analyzing the security strategies implemented by the Satgas Pamantas in the Indonesia-Malaysia land boundary area, especially those in Sajingan Besar and Paloh Subdistricts. The research was conducted involving civil servants, Forkopimda, and other stakeholders in the Regency, Subdistricts and villages in the area as well as local village communities. This study uses a qualitative research design with several data collection techniques, including observation, analysis of questionnaire, documents and interviews. The results of the study concluded that the potential military threat is a violation of the border region which is motivated by the issue of boundary markers and OBP while non-military threats that potentially occur in the Sambas Regency land border area are various illegal activities, theft of resources, human trafficking, illegal trading / smuggling of groceries and drug smuggling, and it can be said that the strategy is not yet effective enough and has not been optimal because the strategy implemented is less proportional, less balanced. and less coordinated in "ends", "ways" and "means", so that "risk" arises, namely the number of illegal activities occurring at the border, thus suggesting that to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia, it is necessary to prioritize accelerating the resolution of OBP problems and implementing proportional, balanced and coordinated security strategies, and synergizing with other stakeholders in the region.

Keywords: Strategy, Security, Land Border, Threats

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Aspek Teoritis	10
1.4.2 Aspek Praktis	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Strategi	11
2.1.2 Strategi Pertahanan Negara	13
2.1.3 Teori Perbatasan	14
2.1.4 Teori Keamanan	15
2.1.5 Konsep Ancaman.....	17
2.1.5.1 Ancaman Militer	18
2.1.5.2 Ancaman Non Militer.....	20
2.1.6 Teori Peran	20
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	23
2.2.1 Penelitian Tentang Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia	

	di Sambas	23
2.2.2	Penelitian Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia	25
2.2.3	Penelitian Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya	27
2.2.4	Penelitian Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan	28
2.2.5	Penelitian Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi	29
2.3	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	34
3.1	Metode dan Desain Penelitian	34
3.1.1	Metode Penelitian	34
3.1.2	Desain Penelitian	34
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3.	Subyek dan Obyek Penelitian	37
3.3.1	Subyek Penelitian	37
3.3.2	Obyek Penelitian	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1	Studi Pustaka	41
3.4.2	Observasi.....	41
3.4.3	Wawancara	42
3.4.4	Studi Dokumentasi.....	42
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	43
3.6	Teknik Analisis Data	44
BAB 4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	47
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Sambas	47

4.1.1.1	Gambaran Kecamatan Sajingan Besar.....	49
4.1.1.2	Gambaran Kecamatan Paloh.....	50
4.1.2	Gambaran Umum Pos Pamtas	53
4.1.2.1	Pos Sajingan Terpadu (Koki SSK).....	54
4.1.2.2	Pos Temajuk.....	56
4.1.2.3	Pos Camar Bulan.....	57
4.1.2.4	Pos Sei Tengah	59
4.1.2.5	Pos Sei Bening	60
4.1.2.6	Pos Gabma Biawak	61
4.1.2.7	Pos Gabma Sajingan.....	62
4.1.2.8	Pos Simpang Tiga Lokpon.....	64
4.1.2.9	Pos KM 28	65
4.2	Hasil Penelitian	66
4.2.1	Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	67
4.2.2	Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	74
4.3	Pembahasan.....	82
4.3.1	Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	83
4.3.2	Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	87
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	91
5.1	Kesimpulan	91
5.1.1	Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	91
5.1.2	Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia- Malaysia di Kabupaten Sambas.....	91
5.2	Rekomendasi	92

DAFTAR PUSTAKA.....	94
Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	97
Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian.....	100
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	103
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	111
Lampiran 5 Dokumen Pendukung/Dokumentasi.....	122
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Lykke.....	14
Gambar 2.2	Skema Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1	Kedudukan Pos-Pos Pamtas di Kabupaten Sambas.....	54
Gambar 4.2	Keadaan Pos Sajingan Terpadu (Koki SSK)	55
Gambar 4.3	Keadaan Pos Temajuk	57
Gambar 4.4	Keadaan Pos Camar Bulan	58
Gambar 4.5	Keadaan Pos Sei Tengah.....	60
Gambar 4.6	Keadaan Pos Sei Bening.....	60
Gambar 4.7	Keadaan Pos Gabma Biawak	62
Gambar 4.8	Keadaan Pos Gabma Sajingan.....	63
Gambar 4.9	Keadaan Pos Simpang Tiga Lokpon	65
Gambar 4.10	Keadaan Pos KM 28.....	66
Gambar 4.11	Gelar Pos Pamtas SSK Satgas Pamtas di Sambas	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu Yang Relevan	30
Tabel 3.1	Perencanaan Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1	Letak Geografis Kabupaten Sambas Menurut Garis Lintang Bujur	48
Tabel 4.2	Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Paloh...	52
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sajingan Terpadu	78
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Simpang Tiga Lokpon	78
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Temahuk	79
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas KM 28	79
Tabel 4.7	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Camar Bulan	80
Tabel 4.8	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sei Bening	80
Tabel 4.9	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Gabma Biawak	81
Tabel 4.10	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Gabma Sajingan	81
Tabel 4.11	Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sei Tengah	82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya kekayaan alam, dan menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Wilayah perbatasan sebagai kawasan terdepan (beranda) dari wilayah negara memiliki peran strategis dalam menjaga integritas teritorial negara. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada hukum internasional. Perbatasan negara dengan negara lain dapat berupa perbatasan darat ataupun perbatasan perairan. Perbatasan darat negara Indonesia yang langsung berhubungan dengan negara tetangga adalah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Papua New Guinea.

Dalam Lampiran Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 Subsubbab 5.3.1. Kawasan Perbatasan Darat, Pasal A. Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia, point Cakupan Administrasi, disebutkan "Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Serawak sepanjang 966 km yang melintasi 14 Kecamatan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 48 km yang melintasi 2 kecamatan dan 1 kabupaten yaitu di Kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara dengan Malaysia sepanjang 990 km melintasi 17 kecamatan dan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan".

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia cukup beragam. Pada kawasan perbatasan ini, kondisi lintas batas dapat dilihat melalui kondisi pertahanan dan keamanan lintas, ekonomi lintas batas, sosial budaya lintas batas serta sarana dan prasarana lintas batas. Aspek pertahanan dan keamanan lintas batas ditandai persoalan lintas batas terkait aspek pertahanan dan keamanan yaitu berbagai bentuk ancaman kerawanan tindak pidana karena adanya arus barang, jasa dan orang dari dan ke negara Indonesia-Malaysia secara ilegal. Kondisi pelanggaran ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pelanggaran/ilegal terkait batas wilayah negara, arus lalu lintas orang dan barang serta indikasi dari perdagangan lintas batas secara ilegal. Kegiatan perdagangan lintas batas dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik hingga pupuk). Indikasi adanya pelanggaran aspek pertahanan dan keamanan lintas batas juga dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan jalan-jalan tikus yang sulit dideteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan berupa hutan. Disebutkan bahwa adanya jalan-jalan tikus tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas ilegal. Umumnya perlintasan batas ilegal ini dilakukan dengan berbagai agenda, namun seringkali berpotensi mengganggu keamanan dan ketahanan NKRI. Kawasan perbatasan ini seringkali dimanfaatkan untuk, jalur penyeludupan narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya. Selain itu terdapat persoalan yang mendukung timbulnya pelanggaran pertahanan dan keamanan yaitu daya tarik negara yang mendorong terjadinya pelanggaran keamanan. Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan dengan mendirikan pos-pos keamanan sepanjang perbatasan meskipun rasio panjang garis batas dan jumlah pos perbatasan belum terpenuhi.

Berdasarkan *Partnership Policy Paper* Nomor 2/2011, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, halaman 4 “secara garis

besar terdapat tiga isu pokok dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: penetapan garis batas, pengamanan kawasan perbatasan dan pengembangan kawasan perbatasan". Dari ketiga isu pokok tersebut, isu keamanan merupakan isu yang paling mengemuka di perbatasan RI-Malaysia. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan keamanan yang timbul berupa berbagai kegiatan kejahatan lintas negara.

Sedangkan menurut sudut pandang pertahanan, beberapa karakteristik kawasan perbatasan Indonesia dapat dikemukakan di bawah ini (Alkadri dan Hamid, 2007): 1. Adanya kegiatan penyeludupan barang dan tenaga kerja Indonesia; 2. Rentannya persoalan yang berkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia; 3. Rendahnya penegakan supremasi hukum, akibat sangat kecilnya tenaga penegak hukum (terutama polisi perbatasan); 4. Derasnya informasi dan komunikasi dari negara tetangga menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga dibandingkan negaranya sendiri.

Memperhatikan timbulnya berbagai gangguan pertahanan dan keamanan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia, maka kedua negara sepakat untuk melakukan pengaturan kawasan perbatasan. Pengaturan perbatasan RI-Malaysia didasarkan pada Persetujuan Dasar antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (*Basic Agreement on Border Arrangement between the Republic Indonesia and The Malaysia on Border Agreement*). Sesuai dengan perkembangan dinamika kedua negara, maka pengaturan wilayah perbatasan ini terus diupayakan secara paralel dengan kepentingan nasional kedua Negara. Kerjasama perbatasan RI-Malaysia dilaksanakan dengan membentuk forum kelembagaan yaitu *Joint Border Committee (JBC)*, sebuah kerjasama setingkat menteri. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis *JBC* dilakukan dengan *Joint Technical Sub-Committee on Survey, Demarcacy and Mapping (JTSCSM)*. Kerjasama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui *Border Liaison*

Meeting (BLM) yang dilaksanakan setiap tahun sekali baik bertempat di Indonesia maupun Malaysia. Kerjasama perbatasan RI-Malaysia yang ada belum mampu secara optimal mengakomodir kepentingan kedua negara, khususnya bidang pertahanan dan keamanan di perbatasan. Kondisi batas darat antar negara Indonesia-Malaysia meliputi:

- a. Permasalahan *Outstanding Boundary Problems (OBP)*, kasus OBP yang diklaim pihak Indonesia : P. Sebatik, Daerah D 400, G. Jagoi dan Tanjung Datu (4 kasus). Sedangkan yang diklaim pihak Malaysia : P. Sinapad, S. Simantipal , Daerah B 2700 – B 3100, Daerah C 500 – C 600 dan Gunung Raya (5 kasus). Sedangkan kasus Batu Aum diklaim oleh kedua pihak;
- b. Permasalahan survei *Investigation, Refixation, Maintenance (IRM)* Kegiatan *IRM* tahun 2009 dapat dilaksanakan walaupun tidak seluruh target volume kegiatan tercapai. Pihak Indonesia masih memiliki kekurangan dibandingkan Malaysia terutama dalam hal: kelengkapan data, ketersediaan dana untuk survei, aksesibilitas ke lokasi, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Indonesia perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, melengkapi data, menyediakan infrastruktur yang lengkap dan baik, serta melakukan diskusi dengan para ahli/pakar dalam maupun luar negeri.
- c. Masalah *Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)* dan *Joint Border Mapping (JBM)* Kegiatan *CBDRF* dapat terlaksana sesuai dengan target *CBDRF*. Namun data yang dimiliki hanya dalam bentuk buku ukur, azimuth dan

jarak, yang diperlukan data *Comp Sheet*. Diperlukan dana yang besar dan waktu panjang apabila pengukuran *CBDRF* menggunakan interval pilar batas yang semakin pendek. Sumber data yang berbeda (Malaysia – foto udara dan Indonesia data citra- *Terra SAR*, *IFSAR*) menimbulkan masalah saat penggabungan di garis batas.

Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah paling Barat Kalimantan Barat, di Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Ada lima kabupaten berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisinya tak jauh berbeda. Di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, warga menggunakan garis pantai bagi jalur transportasi sehari-hari. Mereka melewati pantai yang menghubungkan Desa Ceremai dan Desa Temajuk di Kecamatan Paloh. Hanya kendaraan roda dua yang bisa lewat. Butuh keahlian tersendiri. Bila tidak, kendaraan roda dua akan tenggelam di pasir, rantai putus, atau mesin motor jebol karena masuknya air laut. Akibat tak adanya jalan, angkutan jasa dan barang jadi mahal. Ada satu karakteristik khas di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Meski terpisah batas negara, warga sepanjang batas memiliki hubungan erat. Keekerabatan dan hubungan darah membuat hubungan mereka tak pernah terputus. Meski munculnya negara, memisahkan keekerabatan secara geografi karena adanya garis batas negara. Kondisi itu membuat warga di perbatasan, saling tergantung dan membutuhkan. Meski di sisi lain, kebutuhan dan akumulasi kapital, menisbikan hubungan dasar tersebut. Kebutuhan hidup di perbatasan membuat warga harus bersikap realistis dan pragmatis menyikapi keadaan. Ketika mereka bersikukuh dengan tetap memakai uang rupiah atas nama nasionalisme, bisa dipastikan mereka tak akan bisa beradaptasi, dan memenuhi kebutuhan dasar di perbatasan. Apalagi bagi wilayah yang berhubungan langsung dengan

Malaysia. Perbedaan pembangunan ibarat bumi dan langit. Pemerintah Malaysia membangun wilayah perbatasan mereka dengan baik. Pemerintah menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Ada pendidikan gratis dan kesehatan bagi warga. Di wilayah Indonesia, pemerintah kurang memperhatikan pembangunan perbatasan. Sekolah tak ada guru, bangunan rusak parah, Puskesmas tak ada petugas dan sulit dijangkau warga. Kondisi itu menciptakan batas sosial dan kecemburuan. Hanya dengan sedikit pemantik, kecemburuan ekonomi dan kesejahteraan yang timpang bakal menciptakan protes dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Karenanya, tak heran bila ketertinggalan secara infrastruktur, pencapaian ekonomi, berimbas pada sikap warga untuk pindah kewarganegaraan atau mengibarkan bendera Malaysia di wilayah Indonesia. Fenomena lainnya, menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Erma Suryani Ranik sebagaimana diberitakan PontianakPost.co.id pada tanggal 26 September 2017, yang menyindir Malaysia karena banyaknya narkoba dari wilayah jiran itu yang masuk ke Indonesia lewat jalur perbatasan. Termasuk narkoba dari Malaysia yang masuk lewat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Puluhan ribu narkoba dari sana hampir setiap bulan masuk ke Indonesia. Narkoba itu bisa lolos di perbatasan (pos pemeriksaan) Malaysia, tapi bisa tertangkap di perbatasan Indonesia. Narkoba-narkoba itu bisa lolos dari Malaysia dan masuk lewat sejumlah perbatasan yang ada di Kalbar. Seperti di Kabupaten Bengkayang, Sambas, maupun Sanggau. Hampir setiap bulan ada narkoba dari Malaysia masuk dan berhasil ditangkap. Itu belum yang tidak tertangkap, aparat berwenang Indonesia di Kalbar sudah sering menggagalkan upaya menyeludupkan narkoba dari Malaysia. Para tersangka dan barang bukti narkoba itu berhasil ditangkap ketika masuk ke perbatasan Indonesia. Ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam persoalan keamanan di perbatasan. Potensi gangguan pertahanan dan keamanan di perbatasan sangat besar mengingat sedikitnya personel yang ditempatkan di wilayah

perbatasan, pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar masih belum optimal. Ini terjadi hampir di semua kabupaten di perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di Kalbar. Khusus Sambas, selain darat juga berbatasan laut dengan Malaysia.

Wilayah perbatasan adalah bagian penting dari RI yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah maupun DPR. Sedikitnya personel keamanan yang ditempatkan khusus di wilayah perbatasan sehingga perdagangan orang, masuknya narkoba, penyeludupan dan pencurian ikan di wilayah perbatasan masih tinggi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan juga mengakui bahwa wilayah perbatasan rawan kejahatan seperti narkoba, perdagangan orang, dan lainnya. Hampir semua wilayah perbatasan sumber masuknya narkoba, diperlukan peningkatan patroli di kawasan perbatasan. Peningkatan kesejahteraan petugas negara yang menjaga perbatasan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Paradigma dalam mengelola perbatasan harus diubah dengan paradigma baru, wilayah perbatasan harus dilihat sebagai entitas yang memiliki elemen kedaulatan penduduk yang harus dilindungi secara utuh pula. Arah kebijakan pemerintah dalam mengelola perbatasan sudah sesuai dengan nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan pembangunan negara tetangga.

Menurut Asops Kasdam XII (2018), Pos Pengamanan Perbatasan yang melaksanakan tugas di sepanjang kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas berjumlah 8 (delapan) Pos, dengan jumlah patok batas yang harus diawasi sebanyak 645 patok. Sedangkan panjang tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas membentang dari arah Timur menuju ke arah Barat (Pantai) sepanjang 97km (Menurut Ditjen PDT). Dengan demikian apabila kita bagi secara sederhana daerah tanggung jawab tiap Pos Pamtas menjadi rata-

rata (97km: 8pos) =12,125 km/pos, sehingga dengan celah sedemikian lebar maka sangat rawan terhadap berbagai ancaman keamanan berupa tindak penyeludupan, masuknya paham radikalisme dan paham terorisme dengan memanfaatkan celah tersebut. Dan sebagai gelar kewilayahan TNI, Kodam XII/Tanjungpura yang merupakan gelar TNI AD, salah satu tugas yang diemban oleh TNI AD dalam Operasi Militer Selain Perang adalah mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum, di mana TNI AD menggelar kekuatan operasi pengamanan perbatasan darat yang dilaksanakan oleh Kodam XII/Tanjungpura, dengan menempatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) pada titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.

Informasi pendahuluan yang peneliti terima dari Kodam XII bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2019 pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI di seluruh perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia mencapai keberhasilan. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan diindikasikan melalui keberhasilan:

- a. Menggagalkan peyelundupan gula.
- b. Menggagalkan peyelundupan TKI ilegal.
- c. Temuan patok batas yang hilang.
- d. Temuan adanya pelanggaran perbatasan yang dibuktikan dengan ditemukannya eskavator dll.
- e. Membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
- f. Membantu masyarakat di perbatasan dalam pelayanan pendidikan dan lainnya.
- g. Menggagalkan peyelundupan narkoba.

- h. Mencegah tindakan terorisme dan radikalisme yang masuk melalui perbatasan negara.
- i. Mencegah *illegal logging*.
- j. Menangkap buronan tindak kriminal lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terutama karena gelar kekuatan pengamanan perbatasan TNI dihadapkan dengan tugasnya dan potensi gangguan keamanan yang cukup tinggi, serta berbagai pelanggaran lintas batas negara yang sudah terjadi, maka peneliti mengangkat judul dalam penulisan tesis ini adalah “**Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi ancaman pada wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas?
- b. Bagaimana strategi pengamanan perbatasan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Menganalisis potensi ancaman pada wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas.
- b. Menganalisis strategi pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis dalam bidang pengembangan keilmuan sosial khususnya bidang kajian strategi pertahanan, yang baik langsung maupun tidak langsung dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang strategi pertahanan negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan para peneliti dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan serta dapat memberikan sumbang saran tentang pengamanan perbatasan di wilayah perbatasan darat negara.

1.4.2 Aspek Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kegunaan praktis sebagai referensi bagi pengambil keputusan pada berbagai level pemangku kepentingan, untuk menerapkan strategi dan meningkatkan peranan pengamanan perbatasan dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan darat antar-negara Indonesia-Malaysia, Indonesia-PNG dan Indonesia-Timor Leste.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

Pada subbab ini peneliti kemukakan berbagai definisi, konsep, literatur dan teori yang mendasari dan relevan mendukung permasalahan penelitian, yang diperoleh melalui sumber-sumber referensi yang telah dipersiapkan melalui penelitian pendahuluan berupa telaah pustaka atau telaah literatur.

2.1.1 Teori Strategi

Deskripsi tentang teori-teori strategi selalu memunculkan perspektif baru tentang strategi namun selalu mendasari kepada para ahli strategi masa lalu, mulai dari Sun Tzu dengan 13 Kitabnya dalam karyanya *The Arts of War*, sampai dengan Filsuf Carl Von Clausewitz melalui karyanya *On War*. Namun keduanya masih relevan diterapkan terhadap kondisi perubahan jaman dari jaman kuno, jaman modern sampai dengan masa kini.

Menurut Lawrence Freedman, strategi adalah pilihan kata yang sangat tepat untuk mewujudkan berbagai upaya berpikir atau merencanakan segala tindakan sebelum mengambil tindakan yang tepat, ataupun tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Hal ini mengindikasikan suatu proses yang tidak ada pilihan kata lain walaupun arti kata tersebut menjadi acak (*random*) dan tidak pasti dalam penggunaannya. Maka kata “strategi” tidak berbeda jauh dengan kata “kekuasaan” dan “politik” sebagaimana disebutkan dalam buku “*Strategy: a History*”, tertulis:

.One common contemporary definition describes it being about

maintaining a balance between ends, ways and means: about identifying objectives.

Menurut Lykke, Jr dan Arthur F (1989), salah satu definisi umum kontemporer strategi adalah “tentang menjaga keseimbangan antara tujuan, cara dan sumber daya” yang merupakan satu mekanisme yang mengandung identifikasi tujuan, menetapkan metode dan mengatur kemampuan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut.

Menurut Clausewitz, juga ditekankan bahwa konsep dasar sebuah strategi perang adalah pemahaman akan perang itu sendiri. Hal ini berangkat dari pendekatan Clausewitz yang mendefinisikan strategi sebagai bentuk penyatuan tujuan perang, sehingga penjelasan definisi strategi akan selalu cenderung mengarah kepada hubungan antara kekuatan militer dan tujuan politik. Perkembangan lebih lanjut definisi strategi digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan implementasi kebijakan suatu negara. (Clausewitz, 1997).

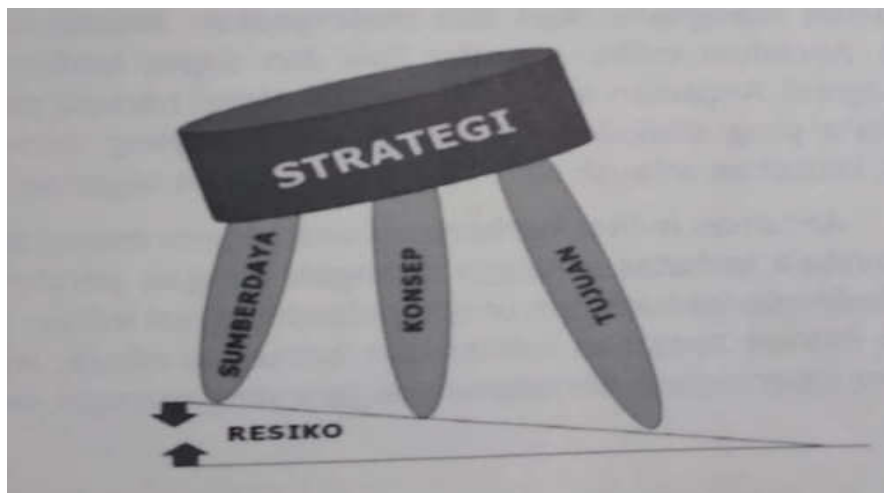
Menurut Wee (2002) dalam buku 36 (tiga puluh enam) strategi Cina klasik ke-18: “Menghancurkan gerombolan penjahat dengan menangkap pemimpinnya. Jika basis kekuatan musuh dimusnahkan dalam satu serangan dan pemimpinnya ditangkap, keseluruhan organisasi akan hancur. Seperti seekor naga dari laut yang hendak berperang di darat, ia akan menghadapi banyak kesulitan”. Strategi ini dibahas oleh Yi Jin dalam “Teori Kun” (Wee Chow How et.al 2002).

2.1.2 Strategi Pertahanan Negara

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Strategi Pertahanan Negara Bab 3 Kerangka Strategis Pertahanan Negara Subbab 3.1 Umum Sub Subbab 3.1.3 berbunyi:

“Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar suatu strategi secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi empat sasaran strategis (*ends*). Kedua, apa sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*means*), yakni dengan mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan (*ways*), yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara ini diwujudkan dengan menyusun pertahanan yang defensif aktif, bersifat semesta dan disusun secara berlapis, didukung oleh kemampuan untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia dan kemandirian industri pertahanan yang kuat dan mandiri serta dengan mengerahkan elemen-elemen kekuatan nasional secara bersinergi dan terpadu. Apabila ketiga substansi dasar tersebut tidak proporsional, tidak seimbang, dan tidak terkoordinasi maka akan terjadi suatu resiko (*risk*) karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran yang ingin dicapai (*ends*), kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia (*means*),

dan konsep bertindak strategis yang dipilih (*ways*). (Kemhan, pp.48).



Gambar 2.1 Model Lykke

Sumber: diolah peneliti

2.1.3 Teori Perbatasan

Menurut Makmur Supriyatno (2016), kebijakan dan strategi pertahanan harus dapat diimplementasikan pada perencanaan yang bersifat operasional dan taktikal, untuk melakukan itu harus mengenali secara lebih detail terhadap lanskap perbatasan dan perspektif geografi dan geopolitik serta ekonomi, sehingga dapat membantu untuk menjelaskannya. Faktor-faktor sosial dan fisik yang mendasari atau penyebab sengketa dan konflik yang diakibatkan oleh masalah perbatasan di dunia tersebut, yaitu dengan mempelajari bagaimana manusia mengorganisasi ruang permukaan bumi ini menjadi negara-negara dan atau aliansi. Hal tersebut dilakukan dengan pengamatan tentang kerja sama dan konflik yang teratur terhadap negara-negara di dunia, terutama kaitannya dengan garis batas dan teritorial perbatasan (*borderland*). (Makmur Supriyatno, 2016).

Membangun kekuatan nasional di perbatasan merupakan hal yang sangat penting, yang dalam konteks luas membangun keamanan nasional (*national security*), yaitu membangun keamanan negara atau pertahanan negara, keamanan publik atau keamanan masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun untuk kepentingan keamanan individu (*human security*). Secara formal dalam konteks ke-Indonesia-an, yaitu Pos Lintas Batas (PLB) sekarang ini menjadi tanggung jawab Bea Cukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), Karantina (*Quarantine*), dan keamanan (*Security*) untuk menangkal berbagai kejahatan transnasional (*anti transnational crime*). (Makmur Supriyatno, 2016).

Keamanan negara dalam pertahanan negara, sesuai dengan tugasnya, dilakukan oleh aparaturnya pertahanan negara, yang diletakkan dalam militer dan nirmiliter serta hybrid, dengan demikian selain militer, masyarakat sipil juga memiliki peran dalam melaksanakan pertahanan negara berupa pertahanan nirmiliter dan pertahanan hybrid sesuai dengan bidang profesi masing-masing untuk menjaga perbatasan darat, laut dan udara. (Makmur Supriyatno, 2016).

2.1.4 Teori Keamanan

Teori kompleks keamanan kawasan adalah teori keamanan kawasan yang dipaparkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam buku *Regions and Powers: The Structure of International Security* (2003). Konsep kompleks keamanan kawasan membahas terpusatnya keamanan di wilayah-wilayah yang terbentuk secara geografis. Persoalan keamanan sulit menyebar secara luas, dan ancaman sangat mungkin muncul di dalam kawasan tersebut. Keamanan setiap pelaku di sebuah kawasan berinteraksi dengan keamanan pelaku lain. Biasanya terdapat interdependensi keamanan yang tinggi di dalam suatu kawasan; interdependensi lintas kawasan justru tidak terjadi. Itulah hal yang mendefinisikan sebuah kawasan dan menjadikan keamanan kawasan

sebuah bidang studi yang unik. Adakalanya negara pinggiran memisahkan dua kawasan, contohnya Afghanistan yang terletak di antara Timur Tengah dan Asia Selatan. Kawasan harus diperlakukan sebagai sistem kecil yang membuat semua teori hubungan internasional mampu diterapkan, misalnya keseimbangan kekuasaan, polaritas, interdependensi, sistem aliansi, dll. Teori kompleks keamanan kawasan tidak sama dengan regionalisme, aliran hubungan internasional tahun 1970-an yang berfokus pada integrasi kawasan.

Menurut Richard Ullman, ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dipahami atau didefinisikan sebagai suatu aksi atau serangkaian peristiwa yang dapat memberikan ancaman: a. secara langsung maupun tidak langsung untuk membahayakan kehidupan masyarakat di suatu negara; dan b. untuk membatasi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah suatu negara atau berbagai entitas non-pemerintah yang ada di negara tersebut. Dengan demikian jelas bahwa keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara. Artinya, bahwa ancaman ini tidak hanya dihadapi dengan kekuatan militer, tetapi dihadapi oleh seluruh bangsa. Pada hakekatnya, keamanan nasional merupakan sebuah perwujudan konsep keamanan secara menyeluruh (*comprehensive security*), yang menempatkan keamanan sebagai “konsep multidimensional”.

Sedangkan menurut Barry Buzan, yang menyatakan bahwa keamanan berkaitan dengan lima sektor utama: militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dari pernyataan Barry Buzan di atas dapat dikatakan bahwa keamanan akan terwujud bila kondisi politiknya stabil, ekonominya tangguh, sosial masyarakatnya teratur dan lingkungan hidupnya terjamin, di samping memiliki militer yang kuat.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan darat RI-Malaysia di Kabupaten Sambas seyogyanya dilakukan secara terpadu dan saling mendukung. Pengelolaan kawasan perbatasan dalam aspek keamanan harus diposisikan pada konteks keamanan nasional. Kompleksitas permasalahan-permasalahan di perbatasan tidak boleh ditangani oleh aparat keamanan semata, tetapi seharusnya ditangani secara multisektoral yang melibatkan pihak militer dan pihak sipil.

2.1.5 Konsep Ancaman

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan negara.

Menurut John M Collins dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh, yaitu: cara menilai kemampuannya (*capabilities*), intensitasnya (*intension*), dan kemudahan untuk dapat diserang (*vulnerabilities*).

Pertama, “kemampuan” menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014) adalah sama dengan kompetensi, yaitu kemampuan, namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki ketrampilan (*skill*) saja namun lebih daripada itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Pengertian kapabilitas menurut Baker dan Sinkula (2005) adalah “Kapabilitas adalah kumpulan ketrampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif”. Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari hanya ketrampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

Kedua, “intensitas” adalah kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha. Jadi intensitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. Perkataan intensitas sangat erat kaitannya dengan motivasi, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Intensitas merupakan realitas dari motivasi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan prestasi, sebab seseorang melakukan usaha dengan penuh semangat karena adanya motivasi sebagai pendorong pencapaian prestasi.

Ketiga, “kemudahan untuk diserang” adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kondisi umum yang mencakup faktor fisik, sosio-ekonomi, politik dan budaya, yang berpotensi menyebabkan sekelompok masyarakat lebih mudah tertimpa bencana, atau yang menghambat kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap bencana.

Sedangkan potensi menurut KBBI mengandung pengertian kemampuan yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan. Dalam potensi ancaman terdapat dua hal yang berpengaruh yaitu kombinasi antara motivasi dan kemampuan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori John M Collin dikarenakan menganalisis potensi ancaman pada wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kabupaten Sambas.

2.1.5.1 Ancaman Militer

Definisi ancaman yang dimaksud di sini merupakan suatu yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia yang bersifat ancaman militer sebagaimana dikonsepsikan, meliputi: pelanggaran wilayah, gerakan separatisme, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, terorisme, konflik komunal, serta yang bersifat ancaman non militer meliputi: ancaman

berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ancaman berdimensi legislasi.

Pengertian ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir dan dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa bila tidak segera ditangani. Contoh Ancaman Militer berupa :

- a. Agresi, adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut.
- b. Pelanggaran Wilayah yang dilakukan negara asing dengan menggunakan peralatan seperti kapal maupun pesawat.
- c. Spionase, adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara.
- d. Sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional.
- e. Ancaman dari teroris baik dari jaringan luar negeri maupun dalam negeri.
- f. Pemberontakan yang menggunakan senjata.
- g. Perang saudara yang menggunakan senjata.

2.1.5.2 Ancaman Non Militer

Sedangkan pengertian ancaman non militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Contoh Ancaman Non Militer berupa :

- a. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang.
- b. Imigrasi gelap atau imigrasi ilegal.
- c. Pencurian sumber daya alam secara ilegal.
- d. Banyak tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.1.6 Teori Peran

Pengertian Peran, menurut Koziar Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai

perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.
- f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah.

Menurut Horton dan Hunt (1993), "seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya". Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini

terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama. Dapat dikatakan seseorang menjalankan suatu peran tertentu dengan cara yang berbeda-beda, dalam hal ini seperti guru matematika dalam melakukan perannya akan sangat terlihat berbeda dengan guru agama dalam melakukan perannya, hal ini menggambarkan bahwa peran itu bersifat status sosial yang dimana seseorang yang mendapatkan status sosial tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

2.2.1 Penelitian Tentang Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Sambas

Muhammad Rizki yang melakukan penelitian tentang masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Sambas (Studi Kasus di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat) menyatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang memungkinkan bagi setiap negara untuk menentukan perbatasan wilayahnya dengan menggunakan titik-titik koordinat. Keberadaan titik-titik koordinat yang menunjukkan batas kedaulatan negara relatif stabil karena tidak terpengaruh oleh berbagai kondisi sehingga secara hukum titik-titik koordinat sudah aman untuk menjamin batas kedaulatan negara. Namun keberadaan titik-titik koordinat sebagai penanda perbatasan didarat tidak cukup menjamin pelaksanaan kedaulatan negara pada area tersebut. Hal ini mengingat dalam praktik titik-titik koordinat tidak mudah diterjemahkan oleh masyarakat yang masih bergantung pada tapal batas tradisional baik yang berupa patok, pagar, atau batas fisik lain sebagai penentu area perbatasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arti penting keberadaan tapal batas di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia yang berada di

Desa Temajuk, sebagai manifestasi pelaksanaan kedaulatan Indonesia pada desa tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Maka, metode pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini berfokus pada penelitian literatur untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Bahan-bahan ini akan dianalisis metode kualitatif dengan pendekatan berdasarkan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan dan minimnya pengawasan terhadap patok perbatasan di Desa Temajuk menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional, antara lain persengketaan pemanfaatan lahan dan administrasi pertanahan, penyelundupan barang dan jasa, lalu lintas barang dan jasa tanpa bea masuk, perkawinan antar negara, infiltrasi pengaruh asing, dan migrasi secara illegal.

Pada akhirnya, Peneliti merekomendasikan Pemerintah Republik Indonesia harus lebih serius dalam pembuatan tapal batas secara fisik dan biomana dipandang perlu, maka dibangun tembok pemisah antara Indonesia-Malaysia, untuk daerah perbatasan yang berupa daratan mengingat arti penting secara hukum dan teknis terhadap kehidupan masyarakat yang berdomisili di tapal batas tersebut.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025, pada Undang-undang tersebut mengupayakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara dengan menetapkan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), melalui pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*). Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

BNPP merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah perbatasan negara. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai serambi depan negara, yang berorientasi *outward looking* atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Mengemban visi untuk mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.

2.2.2 Penelitian Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia

Muradi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (CosmoGov, Vol.1 No.1, April 2015) menyatakan : Perbatasan antar-negara ditetapkan melalui garis batas negara, yakni sebuah garis imajiner yang merupakan bagian dari kesepakatan politik. Kesepakatan terkait dengan garis batas antar-negara menjadi penting untuk menghindari ketegangan dan permasalahan di kemudian hari terkait dengan sistem internasional, dimana terdapat kepastian kedaulatan sebuah negara berawal dan berakhir. Sebagaimana ditegaskan oleh Stephen D. Jones terkait dengan ruang lingkup teritorial sebuah negara terdiri dari alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi; maka sebuah negara, termasuk Indonesia, dapat mengklaim wilayahnya dengan pendekatan empat hal tersebut dengan mengacu pada pewarisan wilayah negara kolonial Hindia Belanda. Karakteristik negara yang terbentuk karena warisan wilayah negara kolonial membutuhkan penataan kenegaraan, khususnya pada pengelolaan wilayah perbatasan.

Mengacu pada lima hal pokok terkait dengan pengamanan perbatasan Indonesia, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara dapat diterjemahkan secara positif bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam mengkoordinasikan sistem pengamanan wilayah perbatasannya. Meski pada praktiknya, keberadaan UU tersebut selain tumpang-tindih,

juga terkesan overlapping dengan berbagai produk perundang-undangan yang ada, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan wilayah perbatasan.

Salah satu hal yang menonjol dari tumpang-tindih dan overlapping adalah tidak konsistennya pimpinan Komite Bersama Perbatasan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Sekedar ilustrasi, misalnya perwakilan Indonesia dalam Komite Bersama Perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah Menteri Dalam Negeri, atau antara Indonesia-Malaysia diwakili oleh Menteri Pertahanan, dimana sebelum tahun 2004 dipimpin oleh Panglima TNI. Namun paska terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, semua permasalahan perbatasan menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian menjadi pendukung proses penanganan dan pengelolaan perbatasan. Selain itu setidaknya ada lima permasalahan yang menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan, yakni:

- a. Pertama, semangat otonomi daerah yang pada kondisi penguatan demokrasi lokal relatif baik, namun pada pengembangan wilayah kedaulatan, pemerintah setempat melihat bahwa masalah pengamanan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat. Situasi ini memosisikan masalah pengamanan perbatasan menjadi kurang baik dan cenderung terbengkalai.
- b. Kedua, strategi dan postur pertahanan Indonesia masih pada visi teritorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak terintegrasi dengan baik, karena minimnya Alutsista pendukung.
- c. Ketiga, infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung

lainnya menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya.

- d. Keempat, minimnya dukungan anggaran bagi pengamanan perbatasan secara efektif menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas di lapangan menjadi rendah. Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pemda setempat juga menjadi masalah yang melemahkan pengamanan perbatasan.
- e. Kelima, visi pengamanan yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan tersendiri mengingat ancaman keamanan dan kedaulatan tidak lagi semata-mata berbentuk ancaman agresi militer, tapi lebih banyak pada ancaman non-tradisional yang justru merupakan bagan dari domain penegakan hukum.

2.2.3 Penelitian Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya

Jamiat Akadol meneliti tentang kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan dan hasil dari pembangunan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Benang merah pembangunan perbatasan adalah jalan dan jembatan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun

dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor.

Saat ini jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009. Karena telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka kewenangan pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai tahun 2011, pekerjaan jalan nasional dimulai dan dengan dana dari bantuan *Asean Development Bank (ADB)* sebesar lebih kurang Rp 300 milyar, diperkirakan pekerjaan jalan selesai pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan perbatasan masih diperdebatkan.

2.2.4 Penelitian Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan

Zaenuddin Hudi Prasajo meneliti tentang dinamika masyarakat lokal, khususnya yang berada di Kabupaten Sambas. Sajingan lebih mendekati pada kondisi yang ada di Jagoi Babang dari segi arus lintas batas manusia dan barang. Masyarakat yang ada di sekitar Sajingan adalah masyarakat Melayu yang telah memiliki jalur tradisional lintas batas ke negeri jiran di Serawak sejak lama. Bahkan hubungan kultural antara masyarakat Melayu di Sambas secara umum dan masyarakat Melayu di Kuching sebagai ibukota Serawak telah terjadi sejak masa pra kolonial. Hubungan kerabatan yang dekat antara masyarakat di kedua wilayah tersebut dapat ditelusuri melalui silsilah kekerabatan keluarga Keraton Sambas yang merupakan family dari keluarga Kerajaan Brunei yang dalam perjalanannya menggunakan jalur pantai melalui Kuching. Daerah Sajingan kemudian menjadi jalur alternatif darat yang

menghubungkan masyarakat Melayu di Sambas dan masyarakat Melayu di Kuching melalui Sungai Aruk. Jalur darat Sajingan ini memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi masyarakat Sambas karena sebelumnya mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan memutar melalui Entikong untuk sampai ke Kuching, Serawak. Sementara Entikong telah lama menjadi pintu resmi lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, Sajingan baru saja memiliki pintu resmi lintas batas yaitu ketika PLB dibuka untuk jalur resmi di tahun 2012.

Sajingan dengan demikian bernasib lebih baik dari Jagoi Babang yang sampai saat ini belum menjadi pintu resmi. Perhatian pembangunan di Sajingan masih tergolong rendah dengan bukti-bukti fisik yang dapat disaksikan saat ini. Namun demikian, pembangunan di Sajingan telah jauh lebih baik dibandingkan dengan pembangunan di Jagoi Babang dan Senaning. Jalan yang menghubungkan antara Kota Sambas sebagai ibukota Kabupaten Sambas dan Sajingan telah tersedia walaupun dengan kondisi yang masih sederhana. Sarana listrik pun sudah tersedia sehingga pengembangan sektor lain seperti perdagangan dapat berjalan. Bahkan, walaupun Sajingan menjadi daerah perbatasan yang saat ini memiliki kondisi yang hampir sama dengan Badau dari sisi pembangunan sarana fisik, namun ia memiliki persoalan nasionalisme yang lebih serius dibandingkan Badau. Insiden Camar Bulan yang mencuat beberapa waktu lalu memberikan indikasi ancaman perbatasan yang serius di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas ini.

2.2.5 Penelitian Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi

Syamsul Ma'arif menulis: "Tentara-tentara yang ditugaskan di daerah pelosok sering kali harus menggantikan aparat-aparat sipil yang semestinya bertugas di sana. Banyak dijumpai tentara yang menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah di pedalaman Papua, karena

ketidakhadiran guru-guru yang seharusnya bertugas di sana. Di Papua kepemimpinan tentara masih sangat diperlukan, karena kepemimpinan lokal masih belum mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berbagai kasus korupsi dan konflik antar berbagai kepentingan di Papua justru menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sangat dibutuhkan di Papua, dan seperti halnya peran tersebut hanya mampu dilakukan oleh tentara”. Demikian pula yang terjadi di pelosok perbatasan darat Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/ METODE/ TEORI (KONSEP)	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Rizki (2017) Kualitatif Teori Peran, Teori Partisipasi Teori Sinergitas	Arti Penting Tapal batas di Perbatasan Darat <u>INDONESIA - MALAYSIA</u> sebagai <u>Manifestasi Kedaulatan dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan</u> (Studi Kasus di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat)	Menunjukkan ketiadaan dan minimnya pengawasan terhadap patok perbatasan di desa Temajuk menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional.	Pengawasan terhadap patok perbatasan Kualitatif Teori peran Lokasi di Temajuk, Kec. Paloh	Ada pengawasan terhadap keberadaan patok Teori Strategi Lokasi lebih luas Kec. Paloh dan Kec. Sajingan Besar

1	2	3	4	5	6
2	Muradi (2012) Jurnal Kualitatif Teori Peran,	Pengelolaan Pengaman – an Perbatasan Indonesia	Dalam artikel ini akan didiskusikan perspektif tentang pengelolaan keamanan perbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaan keamanan perbatasan dengan <u>ber</u> bagai prasyarat <u>pen</u> dukong, merujuk <u>ke</u> pada lima poin pengelolaan perbatasan	Analisis strategi Kualitatif Peran patok	Analisis kerawanan Didukung pendekatan kuantitatif Cakupannya hanya di Kabupaten Sambas
3	Jamiat Akadol (2012) Kualitatif	Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya	Mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan	Kebijakan Kualitatif Lokasi perbatasan Sambas	Strategi
4	Zaenuddin Hudi Prasajo (2013) Kualitatif	Dinamika Masyarakat lokal di Perbatasan	Nasionalisme penduduk, warga Dayak Iban dan Melayu Dayau, sebagai bagian NKRI. Warga Dayak Iban, berdiri kokoh memegang teguh adat istiadat dan budaya serta NKRI semboyan masyarakat Badau yaitu "Garuda di Dadaku, Malay sia di Perutku"	Nasionalisme Kualitatif	Strategi Pengamanan

1	2	3	4	5	6
5	Syamsul Ma'arif (2014) Kualitatif Teori Militer profesional	Prajurit Profesional -Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi	Militer profesional patriot, merupakan salah satu perspektif baru, merupakan militer yang selain hadir dengan karakteristik profesional, juga memiliki komitmen mengambil peran dalam tugas non-pertahanan demi kemanusiaan, solidaritas sosial, keadilan bersama, kepentingan nasional, dan kehormatan bangsa berdasarkan keputusan pemerintah sipil.	Profesionalisme prajurit. Membantu kesulitan masyarakat Kualitatif	Tugas pembinaan territorial Lokasi

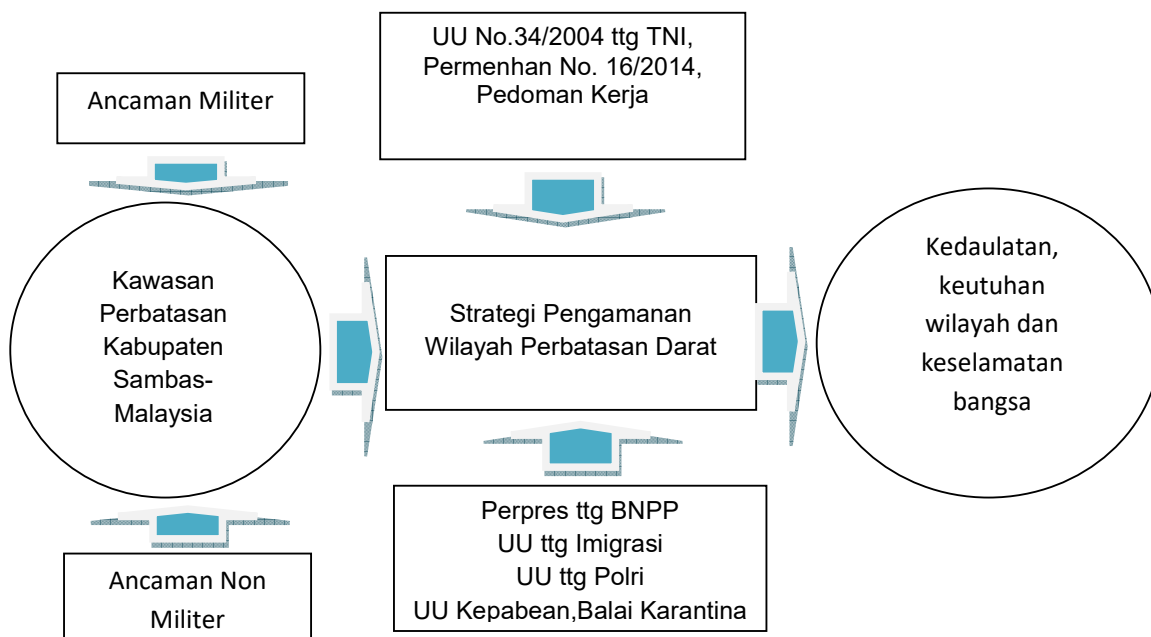
Sumber: diolah oleh peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran.

Perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas merupakan perbatasan yang cukup rawan ditinjau dari aspek gangguan keamanan. Daerah perbatasan ini merupakan kawasan yang digunakan sebagai tempat lintas batas tradisional yaitu lintas batas orang dari dan ke Indonesia-Malaysia. Lintas batas tradisional dan kebiasaan-kebiasaan dimaksud berupa kunjungan kekerabatan antar masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Di samping itu lintas batas tradisional juga dilakukan untuk kegiatan pengolahan kebun masyarakat yang berada di sekitar perbatasan. Oleh karenanya diperlukan pengawasan terhadap para pelintas batas tradisional dan masyarakat yang melakukan kebiasaan-kebiasaan setempat khususnya masyarakat yang bermukim di kawasan kampung-kampung perbatasan Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Guna mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang sangat berpotensi menjadi ancaman gangguan keamanan, dalam rangka mengawasi pelaksanaan lintas batas tradisional, diperlukan peranan dan

kerjasama pengamanan wilayah kawasan perbatasan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Hal ini dipayungi oleh perangkat hukum yang tersedia berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI, sehingga dapat mengancam kedaulatan NKRI. Guna menangkal ancaman, diperlukan pengamanan terpadu antar pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat ancaman keamanan di kawasan perbatasan tersebut. Agar Strategi pengamanan wilayah perbatasan oleh TNI di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia khususnya di wilayah Kabupaten Sambas dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan kerjasama, sinergi dan koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan yang terkait baik antar instansi vertikal maupun dengan pemerintah daerah. Melalui sinergi dan strategi pengamanan perbatasan TNI secara optimal di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, maka penegakan kedaulatan negara, keutuhan teritorial dan keselamatan bangsa akan tercapai.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Pada suatu proses penelitian akan sangat ditentukan oleh yang namanya metode penelitian, karena metode yang digunakan dalam penelitian nantinya akan menentukan bagaimana hasil dari penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dimaksud akan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian harus memiliki kaidah ilmiah dan langkah-langkah yang tepat sebagaimana nantinya metode tersebutlah yang akan menjadi penentu hasil dari penelitian itu sendiri. Menurut Sukmadinata (2005, hlm. 52) metode penelitian adalah “rangkaiannya cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi”. Sedangkan Silalahi (2012, hlm. 12) mengatakan bahwa metode penelitian merupakan “cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penelitian adalah suatu langkah yang digunakan oleh peneliti dengan rangkaian yang ilmiah sehingga didalam metode tersebut nantinya akan menjadi penentu alur dan hasil dari penelitian yang dimaksudkan tadi.

3.1.2 Desain Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di mana data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori yang dipilih. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berupa informasi dari

narasumber yang diperoleh melalui wawancara atau telaahan dokumen dengan pertimbangan bahwa metode ini dapat menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan, namun dalam pelaksanaannya teknik wawancara ini tidak harus dilakukan secara langsung namun dapat juga dilaksanakan melalui sarana yang lain seperti dengan telepon, Surat Elektronik, WA, atau Facebook, dengan responden atau pihak yang dianggap ahli sesuai bidangnya.

Desain penelitian digambarkan beranjak dari permasalahan TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Sambas. Pada pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas menunjukkan banyaknya pelintas batas tradisional yang tidak melewati Pos Lintas Batas yang tersedia atau Pos-Pos Pengamanan Perbatasan TNI. Beberapa kasus tindak kejahatan lintas negara terjadi antara lain penyeludupan narkoba, human trafficking, penyeludupan barang, illegal logging, dan penyeludupan TKI illegal. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk menganalisa secara mendalam melalui suatu metode kualitatif, yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti dalam melakukan pembahasan terhadap fakta hasil penelitian di lapangan.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya (Creswell 2014) Lebih

jauh, Creswell menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari penelitiannya semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maknanya bahwa data yang disajikan di lapangan tentang perilaku dan individu tidak terpisah melainkan merupakan satu kesatuan.

Hal ini sejalan dengan definisi metode kualitatif menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah dalam bukunya Metodologi penelitian kualitatif. yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki latar alamiah, bersifat deskriptif, bekerja dengan fokus, analisis data dilakukan secara induktif, menjadikan makna sebagai yang esensial, fokus studi sebagai batas penelitian, bersifat tentatif dan veritatif, menggunakan kriteria khusus untuk parameter keabsahan data.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dikumpulkan merupakan data pada kurun waktu periode Januari 2015 sampai dengan Agustus 2019, dengan perencanaan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perencanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2019								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1.	Studi pendahuluan	X	X							
2.	Studi Pustaka	X	X	X	X					
3.	Pengajuan proposal Penelitian						X			
4.	Pengujian proposal						X			
5.	Pengumpulan data	X	X	X	X	X	X	X		
6.	Pengolahan data	X	X	X	X	X	X	X		
7.	Analisis data	X	X	X	X	X	X	X		
8.	Penyusunan laporan							X		
9.	Konsultasi & bimbingan						X	X	X	
10.	Perbaikan								X	X
11.	Sidang Tesis								X	
12.	Perbaikan akhir									X

Sumber: Diolah Peneliti

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu berupa orang, benda maupun instansi atau lembaga yang berdasarkan sifat dan kondisinya maka pantas untuk diteliti (Noor, 2011). Subyek penelitian secara spesifik adalah informan/narasumber. Menurut Moleong, informan adalah orang

yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus memiliki banyak pengalaman sesuai dengan latar penelitian.. Para aktor yang dijadikan sebagai informan oleh peneliti adalah anggota masyarakat atau para pejabat yang memahami latar belakang penelitian yang diperlukan guna memberi informasi tentang permasalahan pengamanan perbatasan TNI, situasi dan kondisi di lokasi obyek penelitian (Moleong, 2012). Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hanya manusia selaku peneliti yang dapat melakukan interaksi dengan obyek penelitian dan mampu memahami perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan penelitian guna mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3.3.2 Obyek Penelitian

Dalam menentukan obyek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling digunakan dengan pertimbangan bahwa teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel sumber data menggunakan pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri, misalnya orang yang dianggap berkompeten sehingga dapat memudahkan peneliti mengeksplorasi obyek yang diteliti. Sedangkan teknik snowball sampling merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit, kemudian lama kelamaan menjadi banyak atau besar, karena terjadi pengembangan dari data yang belum memuaskan sejak awal, sehingga mencari orang lain lagi guna dijadikan sumber data.

Obyek penelitian harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai

dalam latar penelitian, serta memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Obyek dalam penelitian ini merupakan instansi pemerintah yang mengetahui dan bertanggungjawab tentang permasalahan pengamanan wilayah di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas. Data-data yang diharapkan diperoleh terkait dengan permasalahan ancaman, meliputi berbagai gangguan keamanan; pengawasan, meliputi lintas batas tradisional, kebiasaan-kebiasaan, pos lintas batas dan pilar batas; serta strategi TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas. Data tentang ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diperoleh dari Polres Kabupaten Sambas beserta satuan jajarannya. Data tentang pos lintas batas dan pilar batas diperoleh dari BPKP Kabupaten Sambas. Data tentang lintas batas tradisional dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat di wilayah perbatasan, diperoleh dari Pos PLBN Aruk dan PLB Temajuk beserta jajarannya. Sedangkan data yang terkait dengan pelanggaran perbatasan diperoleh dari Kodam XII/Tanjungpura dan satuan jajarannya.

Oleh karena itu, sesuai dengan fokus penelitian, maka subyek yang akan dijadikan informan atau narasumber utama yang mengetahui dan berkompeten tentang pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, meliputi:

- a. Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura: Asintel Kasdam XII/Tpr, Asops Kasdam XII/Tpr dan Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang berada di bawah Komando Pangdam XII/Tpr, Danramil Kec. Sajingan Besar.
- b. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat: Kapolres Sambas.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas: Bupati Sambas, Kepala Bagian Pemberdayaan Potensi Perbatasan Setda Kabupaten Sambas.
- d. Kantor Imigrasi Sambas: Kepala Imigrasi Sambas.
- e. PLBN Aruk: Kepala PLBN di dalamnya termasuk yang membidangi Bea cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, Security).
- f. Balai Karantina : Kepala Balai Karantina di Aruk.
- g. Kantor Bea Cukai: Kepala Kantor Bea Cukai di Aruk
- h. Tokoh Masyarakat setempat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Seiring dengan hal tersebut, menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan cara yang strategis dalam penelitian karena tujuan pokok penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara-cara memperoleh data sesuai dengan kondisi nyata atau apa adanya melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan mempelajari literatur yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari empat jenis yaitu melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sumber data sekunder, sedangkan teknik wawancara dan observasi merupakan sumber data primer. (Sugiyono 2010).

Selain teknik wawancara, dapat juga dilakukan teknik observasi untuk memperoleh data-data tambahan di lapangan dengan menggunakan instrumen alat perekam gambar video atau suara. Sedangkan untuk studi pustaka dapat dilakukan untuk mensingkronkan kondisi di lapangan dihadapkan dengan teori yang ada. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, meliputi:

3.4.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah dan mengkomparasikan beberapa buku, jurnal dan dokumen resmi tertulis lainnya guna menyajikan data yang bersifat teoritis. Di samping itu, melalui studi pustaka peneliti memperoleh informasi mengenai teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melaksanakan studi pustaka ini sejak awal penentuan obyek penelitian sebelum dilaksanakannya penelitian lapangan.

3.4.2 Observasi

Menurut Alwasilah C. mengemukakan, bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang dengan diniati untuk memperoleh data yang terkontrol validitas dan reliabilitasnya (2011, h104). Semua kegiatan yang sedang berlangsung tidak lepas dari perhatian. Dengan menyaksikan secara langsung suatu kegiatan, maka kita dapat mempercayai peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, akan menimbulkan kepercayaan suatu kebenaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif guna memperoleh suatu keakraban yang dekat dan mendalam dengan pendekatan keterlibatan yang intensif dengan orang di lingkungan alamiah mereka. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Susan Stainback yang

menyatakan “In participant observation, the researcher observes what their activities”. Pada observasi ini, peneliti melihat langsung dan mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka.

Dengan menggunakan cara penelitian observasi ini, peneliti mengetahui keadaan sesungguhnya. Selain itu, peneliti juga memperoleh data yang benar dan gambaran yang jelas berhubungan dengan masalah ancaman, pengawasan dan strategi pengamanan yang berlaku saat itu.

3.4.3 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh informasi melalui interaksi komunikasi atau perbincangan antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee). Wawancara menurut Esterberg “*a meeting of two persons to exchange information and idea through questions dan responses, resulting in communication and joint contraction of meaning about a particular topic*”. Kegiatan ini merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide, melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai teknik mengumpulkan data pada saat melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga akan digunakan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3.4.4 Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, di samping menggunakan teknik pengumpulan data yang lain seperti

observasi dan wawancara. Dengan teknik studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber semata, melainkan dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang dimiliki informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Hal ini sesuai dengan pendapat AH. Nasution yang menyebutkan, bahwa:”ada pula sumber non manusia (non human resources), diantaranya dokumen, foto dan catatan-catatan statistik. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan complement bagi penggunaan metode observasi dan wawancara.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data dengan teknik triangulasi. Guna menetapkan keabsahan (trustworthiness) data, diperlukan teknik pemeriksaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pemeriksaan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Pelaksanaan teknik pemeriksaan secara triangulasi ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap data dan informasi yang diperoleh.

Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Maksudnya mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Tujuan triangulasi bukan untuk kebenaran tentang fenomena, akan tetapi merupakan pendekatan pemahaman peneliti terhadap apa yang

telah ditemukan. Adapun nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui adanya data yang meluas, tidak konsisten, atau menimbulkan kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber data lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah dan menganalisis data. Menurut Bogdan, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang esensial dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(h 248). Dalam prosesnya analisis berlangsung selama proses pengumpulan data dari setelah selesai pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah pengolahan dan analisis data secara umum dalam penelitian kualitatif menurut Pohan (2011, h238) sebagai berikut:

- a. Melaksanakan proses editing dengan melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto dan catatan lainnya, guna finishing data.
- b. Mentranskrip hasil wawancara, pemilihan data sekunder dan pemilihan foto-foto dan gambar yang diperoleh dari studi lapangan.

- c. Mengklasifikasi data, dengan cara menggolong-golongkan jawaban dari pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya mengelompokkan menurut indikator dan dimensinya.
- d. Melaksanakan penafsiran, sebagai langkah terakhir dalam tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Selanjutnya segera dilakukan analisis data dengan cara memperkaya informasi yang hasilnya merupakan pemaparan naratif. Pemaparan ini untuk menjawab bagaimana gejala ini terjadi dalam bentuk konteks lingkungannya.

Analisis data menurut Sugiyono, meliputi tiga tahapan, yaitu tahap sebelum memasuki lapangan, tahap selama di lapangan dan tahap setelah selesai dari lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki lapangan, penelitian dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk fokus penelitian, yang sifatnya masih sementara dan akan berkembang saat penelitian di lapangan dimulai.
- b. Analisis data selama di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti mengemukakan model Miles dan Huberman sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis data penelitian, mencakup (h.246-252):
 - 1) Reduksi Data (*data reduction*), yaitu menganalisis data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melaksanakan pengumpulan data selanjutnya.

- 2) Penyajian Data (*data display*), merupakan proses lanjutan setelah reduksi data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan narasi. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion and verification*), merupakan langkah terakhir dalam sistem model Miles dan Huberman. Kesimpulan awal yang bersifat sementara, dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung dalam pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan di awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut kredibel, sehingga kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah masih bersifat sementara. Kesimpulan dapat merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek hubungan kausal.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara $0^{\circ}57'29,8^{\circ}$ dan $2^{\circ}04'53,1^{\circ}$ Lintang Utara serta $108^{\circ}54'17,0^{\circ}$ dan $109^{\circ}45'7,56^{\circ}$ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sambas adalah:

- a. Utara: Serawak (Malaysia Timur) & Laut Natuna.
- b. Selatan: Kab. Bengkayang & Kota Singkawang.
- c. Barat: Laut Natuna.
- d. Timur : Serawak (Malaysia Timur) & Kab. Bengkayang

Luas Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2018 terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 193 Desa.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km² atau 21,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 km² atau 1,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas dengan panjang pantai 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kecamatan Selakau) hingga Tanjung Datok (Kecamatan Paloh).

**Tabel 4.1 Letak Geografis Kabupaten Sambas Menurut Garis
Lintang Bujur**

No.	Kecamatan District	Lintang Longitude (DrjMntLtg)	Bujur Longitude (DrjMntLtg)
1.	Selakau	0057'35" - 1006'30"	108056'35" - 109014'50"
2.	SelakauTimur	0057'48" - 1006'52"	109001'42" - 109014'01"
3.	Pemangkat	1005'01" - 1012'14"	108054'01" - 109004'49"
4.	Semparuk	1004'31" - 1012'26"	109001'41" - 109007'01"
5.	Salatiga	1005'07" - 1008'58"	108055'41" - 109004'45"
6.	Tebas	0059'40" - 1017'03"	109003'40" - 109025'38"
7.	Tekarang	1014'13" - 1020'20"	109003'35" - 109010'09"
8.	Sambas	1011'20" - 1024'48"	109009'16" - 109026'23"
9.	Subah	1000'29" - 1024'44"	109015'11" - 109033'07"
10.	Sebawi	1011'32" - 1019'57"	109009'21" - 109020'06"
11.	Sajad	1017'43" - 1024'46"	109020'51" - 109028'23"
12.	Jawai	1011'33" - 1032'15"	108057'25" - 109008'21"
13.	Jawai Selatan	1011'58" - 1017'40"	108057'43" - 109005'45"
14.	Teluk Keramat	1018'13" - 1036'29"	109003'55" - 109018'12"
15.	Galing	1027'15" - 1044'20"	109014'02" - 109027'07"
16.	Tangaran	1028'11" - 1036'01"	109003'43" - 109013'57"
17.	Sejangkung	1011'33" - 1035'28"	109015'23" - 109038'48"
18.	Sajingan Besar	1025'40" - 1049'40"	109025'13" - 109045'13"
19.	Paloh	1035'35" - 2005'43"	109038'56" - 109038'56"
	Kabupaten Sambas	2008'LU - 0033' LU	108039'BT - 110004' BT

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2018

4.1.1.1 Gambaran Kecamatan Sajingan Besar

a. **Geografi**

Letak Wilayah Kecamatan Sajingan Besar terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1°25' Lintang Utara serta 1°49' Lintang Utara dan 109°25' Bujur Barat serta 109°45' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Sajingan Besar adalah: - Utara :Kecamatan Paloh / Serawak (Malaysia) - Selatan : Kecamatan Sejangkung - Barat :KecamatanPaloh/ Kecamatan Galing - Timur : Serawak (Malaysia): Luas Wilayah Luas Kecamatan Sajingan Besar adalah 1.391,20 km² atau sekitar 21,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas, merupakan yang terluas di Kabupaten Sambas Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2017 terbagi menjadi 5 Desa. Desa terluas adalah Desa Sei Bening dengan luas 557,30 km² atau 40,06 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Senatab dengan luas sebesar 110,04 km² atau 7,91 persen dari luas wilayah Kecamatan Sajingan Besar.

b. **Pemerintahan**

Kecamatan Sajingan Besar sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas selain Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia memiliki peranan yang strategis bagi Pembangunan Kabupaten Sambas seluruhnya. Penataan ekonomi, Pemeliharaan Kamtibmas, Penjagaan Keamanan dan juga pelayanan publik tentunya merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manajemen pemerintahan Kecamatan Sajingan Besar. Oleh karena itu Pemerintahan yang solid, struktur yang lengkap

dengan penataan wilayah yang efektif merupakan suatu keharusan bagi Kecamatan Sajingan Besar.

Pada tahun 2017 Struktur Perangkat Kecamatan Sajingan Besar sudah cukup lengkap dengan membawahi 5 Desa, 16 Dusun, 19 RW dan 47 RT. Sedangkan Pegawai negeri dikantor Kecamatan Sajingan Besar sebanyak 14 orang terdiri dari laki-laki 10 orang dan perempuan berjumlah 4 orang.

c. **Penduduk Dan Angkatan Kerja**

Berdasarkan angka hasil proyeksi, penduduk Kecamatan Sajingan Besar pada tahun 2017 berjumlah sekitar 11.267 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 8 jiwa per kilometer persegi. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Sambas. Penyebaran penduduk di Kecamatan Sajingan Besar tidak merata antar desa yang satu dengan desa lainnya. Desa Sanatab merupakan desa dengan tingkat kepadatan Penduduk tertinggi yaitu 24 jiwa/km². Sebaliknya, Sei Bening dengan luas sekitar 40 persen dari total wilayah Kecamatan Sajingan Besar hanya dihuni 2 jiwa/km².

4.1.1.2 Gambaran Kecamatan Paloh

a. **Letak Wilayah**

Kecamatan Paloh terletak di bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1035' Lintang Utara serta 2005' Lintang Utara dan 109038' Bujur Barat serta 109038' Bujur

Timur. Secara administratif, batas wilayah kecamatan Paloh adalah:

- Utara : Laut Cina Selatan
- Selatan : Kecamatan Teluk Keramat
- Barat : Laut Cina Selatan
- Timur : Serawak (Malaysia)

b. **Luas Wilayah**

Desa terluas adalah Desa Sebusus dengan luas 326,21 km² atau 28,41 persen sedangkan yang terkecil adalah Desa Matang Danau dengan luas sebesar 44,01 km² atau 3,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Paloh. Kecamatan Paloh sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas selain Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sambas seluruhnya. Penataan ekonomi, pemeliharaan kamtibmas, penjagaan keamanan dan juga pelayanan publik tentunya merupakan hal-hal yang sangat penting bagi manajemen pemerintahan Kecamatan Paloh.

Oleh karena itu pemerintahan yang solid, struktur yang lengkap dengan penataan wilayah yang efektif merupakan suatu keharusan bagi Kecamatan Paloh. Pada tahun 2017 Struktur Perangkat Kecamatan Paloh sudah cukup lengkap dengan membawahi 8 Desa, 29 Dusun, 59 RW dan 138 RT.

Tabel 4.2 Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Paloh

No.	Desa/Kelurahan	RW	RT
1.	Kalimantan	2	10
2.	Matang Danau	10	21
3.	Tanah Hitam	3	9
4.	Malek	6	13
5.	Nibung	6	12
6.	Sebubus	21	45
7.	Temajuk	6	16
8.	Mentibar	5	12
Jumlah		59	138

Sumber: Kecamatan Paloh Dalam Angka Tahun 2018

c. Penduduk dan Angkatan Kerja

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Berdasarkan angka hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2017 berjumlah sekitar 25.373 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 22 jiwa per kilometer persegi atau 875 jiwa per dusun. Karena itu, persoalan mendesak bagi daerah adalah minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di daerah yang potensinya amat besar.

Penyebaran penduduk di Kecamatan Paloh tidak merata antar desa yang satu dengan desa yang lainnya. Desa Matang Danau merupakan Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 97 jiwa/km². Sebaliknya, Desa Temajuk dengan luas sekitar 20,03 persen dari total wilayah Kecamatan Paloh hanya di huni 8 jiwa/km².

4.1.2 **Gambaran Umum Pos Pamtas**

Gambaran Umum Pos Pamtas di Kabupaten Sambas disajikan dalam deskripsi data dan Gambar. Satgas Pamtas yang bertugas di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas-Malaysia adalah Satuan Setingkat Kompi (SSK) dengan jumlah personel sebanyak 120 orang, yang merupakan bagian dari Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti, yang berkedudukan di Entikong serta berada di bawah kendali operasi Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Pamtas Korem 121/Abw di Sintang. Komandan SSK dipimpin oleh seorang Komandan Kompi sekaligus menjadi Komandan Pos Pamtas yang berkedudukan di Aruk yang juga berfungsi sebagai Pos Komando Kompi (Poskoki) yang membawahi dan bertanggung jawab terhadap 8 Pos Pamtas lainnya yang digelar di sepanjang garis perbatasan mulai dari Temajuk sampai dengan KM 28 dengan jumlah keseluruhan 693 patok yang dipertanggungjawabkan.

Berikut pada Gambar 4.2, yang berwarna coklat dan hijau adalah Pos-Pos Pamtas yang berkedudukan di Kabupaten Sambas.



Gambar 4.1 Kedudukan Pos-Pos Pantas di Kabupaten Sambas

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.1 Pos Sajingan Terpadu (Koki SSK)

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pantas Sajingan Terpadu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di ketinggian Kabupaten Sambas pada Co.52757757, jarak dengan patok D 200 sekitar 750m, berada pada LU:01°36'21,3"- BT: 109°40'33,7". Patok keseluruhan 38 buah yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Terdapat Dusun Aruk, Aping, Beruang dan Kaliau dengan jumlah penduduk 3994 Jiwa (Pria 1795 orang dan Wanita 1177 orang), Suku Dayak bekati 97,6% dan Melayu 4 %, yang beragama Islam 3,6 %, Khatolik 91,7% dan Protestan 4,6% orang.
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Ideologi Pancasila.

- 2) Konsos ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari sebagai petani.
 - 3) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat berbelanja dari wilayah Sambas dan Biawak/Malaysia.
 - 4) Setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.
- d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan kebutuhan sembako ilegal, dan jalur pelintasan mobil/motor ilegal.



Gambar 4.2 Keadaan Pos Sajingan Terpadu (KOKI SSK)

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.2 Pos Temajuk

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pantas Temajuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di ketinggian Kabupaten Sambas pada Co: 4435-2175, jarak dengan garis perbatasan sekitar 3 km patok terdekat Nomor A 54 dapat ditempuh dengan sepeda motor selama 10 menit, berada pada LU:02°00'20,40"- BT: 109°36'01,96". Patok keseluruhan 107 buah yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Antara KV 46-23 s.d. KV 46-21 dengan patok A.40 s.d A.53. Terdapat Kampung Temajuk dengan jumlah penduduk ± 20 KK (Pria 64 orang dan Wanita 73 orang), Suku Dayak 10% dan Melayu 90 %, yang beragama Islam 70 %, Khatolik 14% dan Protestan 16% orang. Di antara KV 45-18 s.d 43-20 terdapat Kampung Camar Bulan dengan penduduk ±18 KK (Pria 42 orang dan Wanita 51 orang).
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Ideologi Pancasila.
 - 2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, petani dan berladang.
 - 3) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat berbelanja dari wilayah Sambas dan Biawak/Malaysia.
 - 4) Setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.

- d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan kebutuhan sembako ilegal, dan jalur pelintasan mobil/motor ilegal dan kemungkinan adanya *illegal fishing* serta adanya *illegal logging*.



Gambar 4.3 Keadaan Pos Temajuk

Sumber : Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.3 Pos Camar Bulan.

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pantas Camar Bulan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di ketinggian Kabupaten Sambas pada Co: 4435-2175, jarak dengan garis perbatasan sekitar 3 km patok terdekat Nomor A 54 dapat ditempuh dengan sepeda motor selama 10 menit, berada pada LU:02°00'20,40"- BT: 109°36'01,96". Patok keseluruhan 107 buah yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Antara KV 46-23 s.d. KV 46-21 dengan patok A.40 s.d A.53. Terdapat Kampung Temajuk dengan jumlah penduduk ± 20 KK (Pria 64 orang dan Wanita 73 orang), Suku Dayak 10% dan Melayu 90 %, yang beragama Islam

70 %, Khatolik 14% dan Protestan 16% orang. Di antara KV 45-18 s.d 43-20 terdapat Kampung Camar Bulan dengan penduduk \pm 18 KK (Pria 42 orang dan Wanita 51 orang).

c. Kondisi sosial:

- 1) Ideologi Pancasila.
- 2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, petani dan berladang.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat berbelanja dari wilayah Sambas dan Biawak/Malaysia.
- 4) Setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.

d. Kerawan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan kebutuhan sembako ilegal, dan jalur pelintasan mobil/motor ilegal dan kemungkinan adanya *illegal fishing* serta adanya *illegal logging*.



Gambar 4.4 Keadaan Pos Camar Bulan

Sumber:Laporan Purna Tugas Yonif 642 Tahun 2018

4.1.2.4 Pos Sei Tengah

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pamtas Sei Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis pada Co: 2848-0389, jarak dengan garis perbatasan sekitar 3 km patok terdekat Nomor A 54 dapat ditempuh dengan sepeda motor selama 10 menit, berada pada LU:01°50'38,13"- BT: 109°27'29,04". Patok keseluruhan 89 buah yang harus dipertanggungjawabkan. Pos berada di dataran rendah, apabila hujan lebat sering terjadi banjir.
- b. Demografi: Jumlah penduduk yang menetap 80KK dengan jumlah \pm 230 orang (Pria \pm 113 orang dan Wanita \pm 117 orang), Suku Dayak Bekati 80% dan Melayu 20 %, yang beragama Islam 20 %, Khatolik 35% dan Protestan 45% orang.
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Ideologi Pancasila.
 - 2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari berkebun dan sebagian kecil sebagai nelayan.
 - 3) Setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.
- d. Kerawanan: merupakan masih kemungkinan adanya *illegal logging*. Apabila hujan lebat akan terjadi banjir, sehingga binatang buas seperti buaya kadang naik ke daerah pemukiman.



Gambar 4.5 Keadaan Pos Sei Tengah

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.5 Pos Sei Bening

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pamtas Sei Bening dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di ketinggian Kabupaten Sambas pada Co: 4268-9368, jarak dengan garis perbatasan sekitar 3 km patok terdekat Nomor A 54 dapat ditempuh dengan sepeda motor selama 10 menit, berada pada LU:04°16'50,01"- BT: 116°29'06,60". Patok keseluruhan 91 buah yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Jumlah penduduk ± 600 jiwa (Pria 320 orang dan Wanita 270 orang), Suku Dayak 80% dan Melayu 20 %, yang beragama Islam 20 %, Kristen 80% orang.
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Ideologi Pancasila.
 - 2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari berkebun.
 - 3) Tingkat pendidikan masyarakat rendah.

- 4) Hampir setiap permasalahan di selesaikan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.
- d. Kerawanan: kemungkinan adanya kegiatan *illegal logging*.



Gambar 4.6 Keadaan Pos Sei Bening

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.6 Pos Gabma Biawak

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pantas Camar Bulan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di wilayah Malaysia pada Co: 6020-7099, berada pada LU:01°32'47,84"- BT: 109°44'36,14". Tidak ada patok yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Jumlah penduduk ± 432 jiwa. Agama mayoritas 98,15% Kristen, 1, 85%. Suku Dayak 98% dan Melayu 2 %,
- c. Kondisi sosial:
- Pos berada di wilayah Malaysia, yang masyarakatnya sebagai petani, dagang, berkebun dan berburu.

- d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan kebutuhan sembako ilegal, dan jalur pelintasan mobil/motor ilegal dan kemungkinan adanya *illegal fishing* serta adanya *illegal logging*.



Gambar 4.7 Keadaan Pos Gabma Biawak

Sumber:Laporan Purna Tugas Yonif 642 Tahun 2018

4.1.2.7 Pos Gabma Sajingan

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pamtas Gabma Sajingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di wilayah ketinggian pada Co: 5244-7789, berada pada LU:01°36'32,63"- BT: 109°40'24,87". Patok keseluruhan 129 buah yang harus dipertanggungjawabkan.
- b. Demografi: Terdapat Kampung Aruk, Aping, Bruang dan Desa Kaliau dengan jumlah penduduk ± 3994 jiwa (Pria 1795 orang, wanita 1177 orang). Agama Islam 147 orang,

Katolik 3663 dan Protestan 184 orang. Suku Dayak 97,6% dan Melayu 2,4%.

c. Kondisi sosial:

- 1) Ideologi Pancasila.
- 2) Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah dengan rata-rata pekerjaan sehari-hari sebagai petani.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan pokok berbelanja ke Sambas atau Biawak/Malaysia.
- 4) Hampir setiap permasalahan di selesaikan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.

d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan kebutuhan sembako ilegal, dan jalur pelintasan mobil/motor ilegal.



Gambar 4.8 Keadaan Pos Gabma Sajingan

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 642 Tahun 2018

4.1.2.8 Pos Simpang Tiga Lokpon

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pamtas Simpang Tiga Lokpon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Pos berada pada Co: 4435-2175, wilayahnya pada LU : 01°32'36,63"- BT: 109°42'34,16". Patok keseluruhan 59 buah yang harus dipertanggungjawabkan. Pos berada di perkebunan sawit.
- b. Demografi: Penduduk Suku Dayak Iban dan Melayu serta pendatang, mayoritas beragama Kristen Protestan 16% orang. Jarak dari kampung terdekat Desa Aping sekitar 5,3 km.
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Pendidikan rata-rata lulusan SD dan sebagian kecil lulusan SMP untuk meneruskan tingkat SMA hanya ada di Sajingan dan Sambas..
 - 2) Hukum yang berlaku adalah hukum adat.
 - 3) Hampir setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.
- d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan TKI ilegal, jalur perdagangan ilegal.



Gambar 4.9 Keadaan Pos Simpang Tiga Lokpon

Sumber: Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.1.2.9 Pos KM 28

Keadaan geografi, demografi dan kondisi sosial serta kerawanan pada Pos Pamtas KM 28 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Geografi: Secara geografis berkedudukan di ketinggian Kabupaten Sambas pada Co: : $01^{\circ}32'37,21''$, berada pada LU: : $01^{\circ}32'37,14''$ - BT: $109^{\circ}44'31,38''$. Pos berada di bawah bukit. Patok keseluruhan 64 buah yang harus dipertanggung-jawabkan.
- b. Demografi: Jarak dari kampung terdekat Kampung Aping berjarak 8,2 km dengan penduduk Suku Dayak Iban dan Melayu. Mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan.
- c. Kondisi sosial:
 - 1) Pendidikan rata-rata lulusan SD dan sebagian kecil lulusan SMP untuk meneruskan ke tingkat SMA yang terdekat hanya ada di Sajingan.
 - 2) Hampir setiap permasalahan di selesaikan dengan kekeluargaan dan hukum adat, kecuali yang menyangkut pidana akan diselesaikan dengan Hukum Positif.

- d. Kerawanan: merupakan jalur pelintasan sawit ilegal, jalur pelintasan TKI ilegal, jalur pelintasan mobil/motor ilegal dan perburuan ilegal.



Gambar 4.10 Keadaan Pos KM 28

Sumber:Laporan Purna Tugas Yonif 511 Tahun 2019

4.2 Hasil Penelitian

Pengumpulan data sekunder maupun primer, melalui wawancara serta pengamatan langsung di lapangan sangat menentukan hasil penelitian dalam pembahasan serta analisis selanjutnya. Berikut peneliti sajikan dan diskripsikan data atau informasi yang berhasil peneliti kumpulkan sesuai dengan aspek yang diteliti yaitu aspek hakekat ancaman terhadap keamanan dan strategi pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, khususnya di wilayah administrasi Kecamatan Paloh dan Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

4.2.1 Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Sambas

4.2.1.1 Aspek Kemampuan (Capability)

a. Ancaman Militer

Pengamanan perbatasan di wilayah Kabupten Sambas dilaksanakan dengan menggelar pos-pos perbatasan dalam rangka mengantisipasi ancaman yang timbul. Hal tersebut dijelaskan Asintel Kodam XII/Tpr dalam wawancara penelitian, bahwa ancaman militer yang kemungkinan besar terjadi saat ini adalah pelanggaran wilayah dan masuknya kelompok teroris dari Malaysia.

Hal yang sama juga disampaikan Asops Kodam XII/Tpr, dimana gelar pasukan saat ini untuk mengantisipasi kemungkinan yang paling besar terjadi adanya pelanggaran wilayah dan juga kemungkinan adanya usaha kelompok teroris yang akan masuk ke Indonesia.

Sedangkan Dansatgas Pambatas dalam wawancara penelitian menjelaskan bahwa saat ini pelanggaran wilayah perbatasan kemungkinan besar terjadi dilatar belakang persoalan-persoalan patok batas dan permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP).

Dari penjelasan para informan di atas ancaman yang memungkinkan terjadi di perbatasan Kabupaten Sambas adalah ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas.

b. Ancaman Non Militer

Menurut Asintel Kodam XII/Tpr dalam wawancara penelitian menjelaskan selain ancaman pelanggaran batas, di perbatasan Sambas juga terjadi berbagai kegiatan illegal seperti *illegal logging*, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan yang sulit untuk dihentikan sehingga menuntut perhatian serius penanganannya dari Koops Pamtas Kodam XII/Tpr.

Hal yang sama disampaikan Asops Kodam XII/Tpr bahwa di dalam evaluasi pelaksanaan pengamanan perbatasan Kodam XII/Tpr terdapat beberapa kegiatan illegal logging, trafficking, pencurian sumber daya alam dan penyeludupan barang dan narkoba dari Malaysia ke Indonesia sehingga menjadi penekanan Koops Pamtas Kodam XII/Tpr kepada Satgas Pamtas Kodam XII/Tpr.

Terkait dengan penyelundupan TKI dari Indonesia Ke Malaysia melalui perbatasan di Sambas, dijelaskan oleh Kapolres Sambas dimana hal tersebut merupakan kegiatan ilegal yang sulit dihentikan karena adanya dorongan faktor ekonomi.

Hal senada juga disampaikan Kabag Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Sambas, bahwa pelanggaran di wilayah perbatasan masih terjadi penyeludupan barang ilegal (sembako, narkoba dan lain-lain) serta masih terjadi kasus human trafficking.

Kegiatan illegal dan penyeludupan dilakukan namun tidak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam hal ini di PLBN Aruk, namun kebanyakan melalui jalan-jalan tikus yang berada di kawasan perbatasan darat yang lolos dari

pantauan Pos Pamtas. Hal tersebut dijelaskan Perwakilan Hanggar Bea dan Cukai Aruk, bahwa menyatakan pelanggaran kegiatan ilegal semenjak berdirinya PLBN Aruk tidak pernah terjadi, karena pemeriksaan dilakukan secara ketat, adapun pemasukan barang melalui PLBN Aruk oleh masyarakat perbatasan dilakukan dengan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas) dengan batasan maksimum 600 Ringgit Malaysia per bulan per orang untuk keperluan sehari-hari.

Dari uraian di atas, ancaman non militer yang memiliki kemampuan sehingga sulit dihentikan yang terjadi di perbatasan Sambas adalah kegiatan *illegal logging*, *human trafficking*, pencurian sumber daya alam dan penyeludupan barang dan narkoba.

4.2.1.2 Aspek Intensitas (*intension*)

a. Ancaman Militer

Asintel Kodam XII/Tpr dalam wawancara penelitian menjelaskan, bahwa dari laporan khusus kejadian Satgas Pamtas paling sering terjadi dengan intensitas tinggi adalah pelanggaran wilayah dan masuknya kelompok teroris dari Malaysia.

Menurut Asops Kodam XII/Tpr, dari evaluasi pelaksanaan pengamanan perbatasan di perbatasan Sambas paling sering terjadi pelanggaran wilayah dan juga kemungkinan adanya usaha kelompok teroris yang akan masuk ke Indonesia.

Hal senada juga disampaikan oleh Dansatgas Pambatas dalam wawancara penelitian menjelaskan bahwa

saat ini pelanggaran yang paling sering terjadi di sepanjang wilayah perbatasan Sambas adalah ditemukannya pergeseran dan permasalahan terkait patok batas serta pelanggaran wilayah perbatasan.

Dari penjelasan para informan di atas ancaman yang paling sering terjadi dengan intensitas tinggi adalah permasalahan patok batas dan pelanggaran wilayah perbatasan.

c. Ancaman Non Militer

Menurut Asops Kodam XII/Tpr bahwa selain permasalahan patok batas, di wilayah perbatasan Sambas paling sering di temukan adalah beberapa kegiatan illegal logging, trafficking, pencurian sumber daya alam dan penyeludupan barang dan narkoba. Hal ini di dapatkan di semua Pos Batas pada saat pemeriksaan terhadap pelintas batas dari dan ke Indonesia..

Hal senada dijelaskan oleh Kapolres Sambas, bahwa paling sering menangani persoalan-persoalan terkait kegiatan illegal seperti penebangan liar, penyelundupan bahan-bahan sumber alam, penyeludupan manusia dan penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia dari seluruh wilayah hukum Polres Sambas.

Sedangkan Kabag Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Sambas menjelaskan di wilayah perbatasan dengan intensitas tinggi adalah permasalahan penyeludupan barang ilegal sumber daya alam, kebutuhan sembako, penyeludupan narkoba dan lain-lain. Dimana kegiatan ilegal tersebut dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dari uraian di atas terkait dengan ancaman non militer yang paling sering terjadi di sepanjang wilayah perbatasan Sambas adalah berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan.

4.2.1.3 Aspek Kerentanan (Vulnerabilities)

a. Ancaman Militer

Menurut Asintel Kodam XII/Tpr dalam wawancara penelitian, bahwa di wilayah sepanjang perbatasan Kabupaten Sambas paling rentan terjadi pelanggaran wilayah disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari Malaysia maupun yang dibantu oleh masyarakat perbatasan Indonesia di dorong faktor ekonomi dan sosial budaya.

Hal yang sama juga disampaikan Asops Kodam XII/Tpr, dimana penggelaran pos-pos batas sebanyak sembilan pos memiliki kerentanan adanya blank spot area dihadapkan pada panjangnya wilayah perbatasan.

Kondisi tersebut menimbulkan kerawanan adanya ancaman pelanggaran wilayah dan juga kemungkinan adanya usaha kelompok teroris yang akan masuk ke Indonesia.

Sedangkan Dansatgas Pambatas dalam wawancara penelitian menjelaskan bahwa di wilayah perbatasan Sambas yang menjadi tanggung jawab satuannya sangat rawan terjadi pelanggaran wilayah perbatasan baik yang berupa pelanggaran patok batas maupun masuknya pencurian sumber daya alam di wilayah Indonesia.

Dari penjelasan para informan di atas bahwa masih adanya blank spot area di perbatasan Kabupaten Sambas

yang menimbulkan kerawanan adanya ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas.

B. Ancaman Non Militer

Asintel Kodam XII/Tpr dalam wawancara penelitian menjelaskan bahwa di wilayah perbatasan Sambas sangat rentan terjadinya berbagai kegiatan ilegal seperti *illegal logging*, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan kegiatan penyeludupan, dikarenakan latar belakang panjangnya perbatasan tidak sebanding dengan jumlah pos Pamtas yang sudah digelar sehingga menimbulkan adanya blank spot area sebagai pintu masuk berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan tersebut. Hal yang mendasar lainnya di wilayah perbatasan Kab.Sambas-Malaysia sampai dengan saat ini adalah kesenjangan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara tetangga, kalau mau membangun perbatasan bangun dulu kesejahteraannya, bangun ekonominya, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kawasan perbatasan, sehingga nantinya berkurang keinginan masyarakat mencari pekerjaan ke Malaysia, berkurang juga kegiatan-kegiatan ilegal lainnya.

Hal senada disampaikan oleh Dansatgas Perbatasan, bahwa di beberapa titik antara delapan Pos Pamtas yang sudah digelar terdapat blank spot area sebagai pintu masuk berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan yang sulit dihentikan.

Sedangkan Bupati Sambas dalam wawancara penelitian, menyampaikan bahwa wilayah perbatasan Sambas rentan terhadap penyeludupan barang ilegal

(sembako, narkoba dan lain-lain) serta masih terjadi kasus human trafficking. Hal tersebut karena banyaknya jalan-jalan tikus yang tidak terdapat pos pengaman perbatasan, selain itu dampak adanya kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan menimbulkan kerawanan terhadap berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan ilegal dan penyeludupan dilakukan namun tidak melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN), namun kebanyakan melalui jalan-jalan tikus yang berada di kawasan perbatasan darat yang lolos dari pantauan Pos Pamtas. Hal tersebut dijelaskan Perwakilan Hanggar Bea dan Cukai Aruk. Lebih jauh dijelaskan Perwakilan Hanggar Bea dan Cukai bahwa pelanggaran kegiatan ilegal semenjak berdirinya PLBN Aruk tidak pernah terjadi, karena pemeriksaan dilakukan secara ketat, adapun pemasukan barang melalui PLBN Aruk oleh masyarakat perbatasan dilakukan dengan KILB (Kartu Identitas Lintas Batas) dengan batasan maksimum 600 Ringgit Malaysia per bulan per orang untuk keperluan sehari-hari.

Hal senada diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa banyak jalan tikus yang tidak dijaga oleh pos perbatasan sehingga rawan terjadinya kegiatan pencurian kayu, hasil hutan dan berbagai penyelundupan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia.

Dari uraian di atas, bahwa wilayah perbatasan Sambas banyak terdapat jalan tikus sehingga rentan sebagai pintu masuknya berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan dari Malaysia ke Indonesia.

4.2.2 Strategi Pengamanan Perbatasan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas.

4.2.2.1 Tujuan

Asops Kodam XII/Tpr menjelaskan dalam wawancara penelitian, bahwa tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Kodam XII/Tpr adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Tujuan yang bersifat lokal pada gelar atau *deployment* pos-pos pamtas satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) pada sepanjang perbatasan darat Sambas dengan Malaysia adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, dalam rangka mendukung operasi Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dan Kolakops Pamtas Korem 121/Abw. Namun tujuan besarnya atau tujuan nasionalnya adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Hal ini tersebut dijelaskan Dan SSK Satgas Pamtas:

Tugas pokok kami sebagai bagian dari Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns adalah seperti terpampang di tiap-tiap Pos Pamtas, yaitu: 'Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan operasi pengamanan perbatasan darat mulai hari "H" jam "J" selama 9 bulan di sepanjang wilayah Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, dan Kab. Sambas (+ 359,45 km) dalam rangka mendukung tugas pokok Kolakopsrem 121/Abw, beralih ke tugas selanjutnya atas perintah'. Kami kebagian pengamanannya yang di Sambas, Saya pikir demikian pula Kolakopsrem 121/Abw dan Koops Pamtas Kodam XII/Tpr, tujuan nasionalnya adalah menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Tujuan pada implementasi strategi

pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas adalah mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas. Observasi di lapangan, menunjukkan garis perbatasan dimaksud membentang dari pantai arah Utara/Barat sampai ke arah Timur/Selatan sepanjang kurang lebih 97 km. (Wawancara, 11 Agustus 2019).

Dari uraian di atas bahwa tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Sambas adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

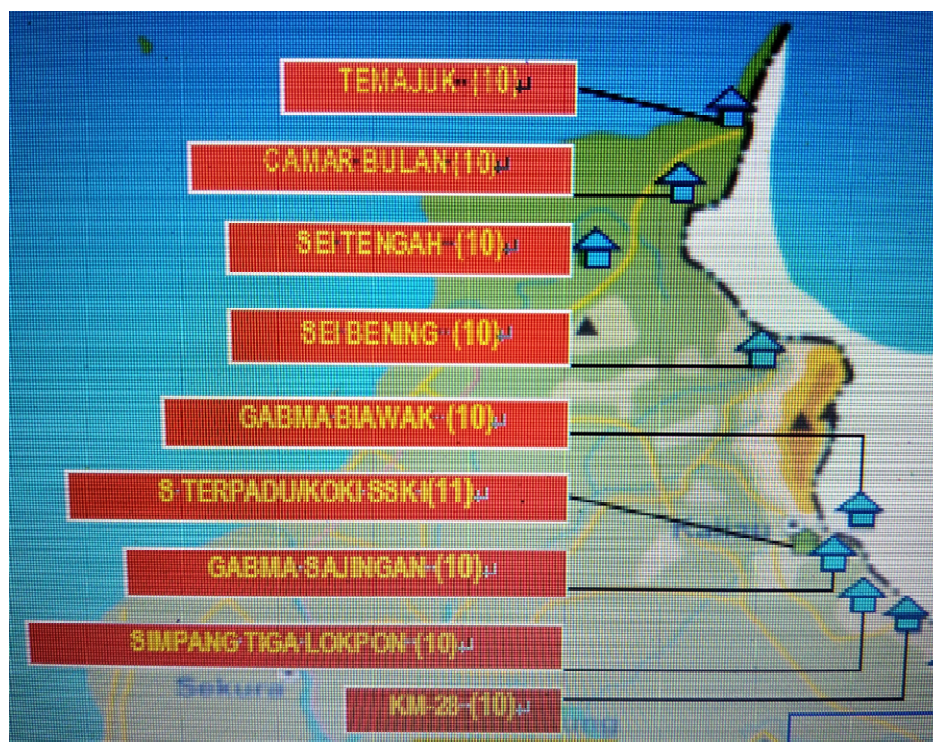
4.2.2.2 Pelaksanaan (Ways)

Menurut Asops Kodam XII/Tpr, bahwa pengamanan perbatasan di wilayah Sambas dilaksanakan dengan menggelar sembilan pos batas yang dilakukan oleh Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Satgas Yonif 643/Wns dimana setiap pos dipimpin oleh seorang Dan Pos berpangkat perwira, namun beberapa pos juga dipimpin seorang Bintara. Komandan SSK Satgas Pamtas bertanggung jawab kepada Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns yang berdislokasi di Entikong, selanjutnya Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bertanggung jawab kepada Dan Kolakops Pamtas yaitu Danrem 121/Abw yang berdislokasi di Sintang.

Hal senada juga dijelaskan Komandan SSK Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns, bahwa konsep atau cara pelaksanaan tugas dengan melaksanakan tugas-tugas untuk Pos-Pos Pamtas, yang sudah ditetapkan oleh Kolaksops Korem 121/Abw, dapat dibedakan menjadi empat bidang yaitu bidang Intelijen, bidang Operasi, bidang Minlog dan bidang Teritorial.

Pertama, tugas untuk bidang intelijen yaitu melaksanakan pemantauan terhadap lintas batas, bekerja sama dengan Kantor Imigrasi PLBN Aruk; melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan illegal di jalan garis perbatasan, hutan, dan jalan yang menghubungkan RI & Malaysia bersama Kepala PLBN Aruk/PLB Temajuk serta dinas Bea Cukai; menempatkan aparat Intel di titik-titik rawan kegiatan illegal bekerja sama dengan satuan intel setempat; melaksanakan pemantauan TKI yang dideportasi dari Malaysia. Kedua, tugas untuk bidang operasi yaitu: melaksanakan patrol pengamanan patok batas negara; melaksanakan patrol gabungan TNI dan TDM; melaksanakan pengamanan pos perbatasan; melaksanakan pemantauan kegiatan di PLB; melaksanakan sweeping darat kapal dan pengendapan; mengikuti berbagai giat olahraga; menjadi panitia berbagai kegiatan TNI dan Pemerintah Daerah; membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Polri dalam berbagai kegiatan. Ketiga, tugas untuk bidang Minlog yaitu: mengajukan bekal sesuai kebutuhan; mengajukan suku cadang dan baterai ke Komando Atas sesuai dengan kebutuhan; melaksanakan perawatan dan pengecekan terhadap randis setiap saat; mendistribusikan bekal kelas ke Pos Jajaran. Keempat, tugas untuk bidang Teritorial yaitu: melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah sekitar Pos; kegiatan olahraga bersama masyarakat di sekitar Pos; menjadi Pembina upacara

bendera di sekolah; melaksanakan karya bhakti; membangun sarana ibadah; memberi materi wawasan kebangsaan dan bela negara; melaksanakan komsos melalui anjungsana ke Tokoh Agama, Masyarakat dan Adat; ikut serta dalam kegiatan pelayanan kesehatan setempat di Kabupaten Sambas.” (Wawancara, 12 Agustus 2019).



Gambar 4.11 Gelar Pos Pamantas SSK Satgas Pamantas di Sambas

Sumber: diolah peneliti

Berikut peneliti sajikan kondisi sumber daya (means) baik Sumber Daya Manusia (personel) maupun sarana prasarana pendukungnya pada setiap pos pamantas yang Peneliti peroleh dari masing-masing Komandan Pos dan Peneliti sajikan dalam bentuk tabel, meliputi:

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sajingan Terpadu

POS SAJINGAN TERPADU		
Kekuatan	19 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	5275-7757	Hellypad: Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°35'25,3" – 109°40'48,0"
Pos Dalduk	Ada	Portal: Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (PLN dan Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air: Ada
Ruang Genset	Ada (RR)	Sepeda motor: 3 Unit (KLX 150)
Dapur	Ada	Truck: 1 Unit Mitsubishi Fuso
Barak	Ada	Strada: 1 Unit
Parabola	1 Unit	
Alkom	Rig GM 338 Motorola, SSB Micom 2ES, HT Surveillance dan HT Motorola GP 338	
Jaringan Selular	Aktif	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Simpang Tiga Lokpon

POS SIMPANG TIGA LOKPON		
Kekuatan	13 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	5644-7064	Hellypad: Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°32'37,6" – 109°42'34,8"
Pos Dalduk	Ada (Swadaya)	Portal: Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air: Ada (Air Hujan dan Sungai)
Ruang Genset	Tidak Ada	Sepeda motor: 1 Unit (KLX 150 Rusak Ringan)
Dapur	Ada	Truck: Tidak ada
Barak	Ada	Strada: Tidak ada
Parabola	1 Unit	
Alkom	Rig GM 338 Motorola (Inv Yonif 642/Kps), HT Surveillance dan HT Motorola XiR P6620	
Jaringan Selular	Aktif	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Temajuk

POS TEMAJUK		
Kekuatan	18 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	5644–7064	Hellypad: Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 02°00'20,9" – 109°36'01,0"
Pos Dalduk	Ada	Portal: Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air: Ada (Air Hujan dan Sungai)
Ruang Genset	Ada	Sepeda motor: 2 Unit (KLX 150)
Dapur	Ada	Truck: Tidak ada
Barak	Ada	Strada: Tidak ada
Parabola	1 Unit	
Alkom	Rig GM 338 Motorola, SSB Micom 2ES, HT Surveillance, HT Motorola XiR P6620 dan HT Motorola GP 338	
Jaringan Selular	Aktif (Tidak Ada Internet)	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas KM 28

POS KM 28		
Kekuatan	10 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	6004–7063	Hellypad: Tidak ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad:
Pos Dalduk	Ada	Portal: Ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air: Ada (Air Hujan dan Sungai)
Ruang Genset	Tidak ada	Sepeda motor: 2 Unit (KLX 150 Rusak Ringan)
Dapur	Ada	Truck: Tidak ada
Barak	Ada	Strada: Tidak ada
Parabola	1 Unit	
Alkom	SSB Micom 2ES, HT Surveillance dan HT Motorola XiR P6620	
Jaringan Selular	Aktif (Tidak Ada Internet)	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Camar Bulan

POS CAMAR BULAN		
Kekuatan	12 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	3831-1825	Hellypad: Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°58'25,5" – 109°32'47,5"
Pos Dalduk	Ada	Portal: Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air: Ada
Ruang Genset	Ada	Sepeda motor: 1 Unit (KLX 150)
Dapur	Ada	Truck: -
Barak	Ada	Strada: -
Parabola	1 Unit	
Alkom	SSB Grintek TR2400 dan HT Motorola XiR P6620	
Jaringan Selular	Tidak ada	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sei Bening

POS SEI BENING		
Kekuatan	13 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi: Tidak ada
Co Pos	4268-9368	Hellypad: Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°45'03,3" - 109°35'13,4"
Pos Dalduk	Ada	Portal: Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (PLN swadaya Possistem pulsa RP. 200.000/bulan dan Genset)
Ruang Data	Ada	Air: Ada
Ruang Genset	Tidak ada	Sepeda motor: 1 unit SPM Honda Revo (pinjaman dari masyarakat)
Dapur	Ada	Truck: -
Barak	Ada	Strada: -
Parabola	1 Unit	
Alkom	1 set SSB Yaesu Vertex VX-600 kondisi Baik dan 3 SET HT Motorola XIR P6620 kondisi Baik	
Jaringan Selular	Sinyal HP ada (tempat tertentu) dan Internet tidak ada	

"Sumber: diolah peneliti"

Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Gabma Biawak

POS GABMA BIAWAK		
Kekuatan	10 Orang	Gudang BBM: Ada (Milik TDM)
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi:Ada
Co Pos	5310 7881	Hellypad:Tidak ada
Pos Jaga	Ada (Milik TDM)	Co Hellypad: -
Pos Dalduk	Ada(Milik TDM)	Portal:Ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (PLN Malaysia)
Ruang Data	Ada	Air: Ada (Sumber air dari hujan dan pegunungan)
Ruang Genset	Tidak ada	Sepeda motor: 1 unit KLX 150
Dapur	Ada	Truck: 1 unit milik TDM
Barak	Ada	Strada: 2 unit milik TDM
Parabola	2 Unit kondisi RB	
Alkom	1 set SSB Yaesu Vertex VX-600 kondisi Baik dan 3 SET HT Motorola XIR P6620 kondisi baik	
Jaringan Selular	Sinyal HP ada (tempat tertentu) dan Internet tidak ada	

“Sumber: diolah peneliti”

Tabel 4.10 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Gabma Sajingan

POS GABMA SAJINGAN		
Kekuatan	10 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi:Tidak ada
Co Pos	5244-7789	Hellypad:Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°36'21,3"-109°40'33,7"
Pos Dalduk	Ada	Portal:Ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (PLN dan Solar Cell)
Ruang Data	Ada	Air:Ada (Sumber air dari hujan dan pegunungan)
Ruang Genset	Ada	Sepeda motor: 1 Unit (KLX 150)
Dapur	Ada	Truck:-
Barak	Ada	Strada:-
Parabola	1 Unit kondisi rusak berat	
Alkom	1 set SSB Yaesu Vertex VX-1700 kondisi Baik, 3 set HT Motorola GP 338 kondisi Baik dan 5 set HT Surveillance kondisi Baik.	
Jaringan Selular	Sinyal HP ada dan Internet ada	

“Sumber: diolah peneliti”

Tabel 4.11 Sarana dan Prasarana Pos Pamtas Sei Tengah

POS SEI TENGAH		
Kekuatan	12 Orang	Gudang BBM: Tidak ada
Jenis Bangunan	Permanen	Garasi:Ada
Co Pos	2848-0389	Hellypad:Ada
Pos Jaga	Ada	Co Hellypad: 01°50'37,6"- 109°27'28,1"
Pos Dalduk	Ada	Portal:Tidak ada
Papan Nama Pos	Ada	Listrik: Ada (PLN, Solar Cell dan Genset)
Ruang Data	Ada	Air:Ada(Sumber air dari hujan dan pegunungan)
Ruang Genset	Ada	Sepeda motor: 1 unit KLX 150 kondisi Baik)
Dapur	Ada	Truck:-
Barak	Ada	Strada:-
Parabola	1 Unit kondisi RB	
Alkom	1 set SSB Yaesu Vertex VX-1700 kondisi Baik, 3 set HT Motorola XIR P6620 kondisi Baik dan 1 set HT Motorola RIG 338	
Jaringan Selular	Sinyal HP ada (tempat tertentu) dan Internet tidak ada	

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

4.3 Pembahasan

Pada Subbab pembahasan ini, bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan dan penjelasan yang sistematis dan rinci, Oleh karena itu peneliti berusaha mendapatkan data secara faktual dan interpretasi di lapangan tanpa adanya unsur subjektif dari peneliti. Pada subbab ini peneliti mengaitkan hasil kesimpulan dari data temuan selama penelitian berlangsung di lapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis potensi ancaman keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas serta menganalisis implementasi strategi pengamanannya dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa.

4.3.1 Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas.

4.3.1.1 Aspek Kemampuan (*Capabilities*)

Merujuk pada Teori John M Collins bahwa kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya keunggulan kompetitif. Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari hanya keterampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan menguasai kemampuan dari titik kelemahan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia (2014) adalah sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan, namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (*skill*) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

a. Ancaman Militer.

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa ancaman militer yang memungkinkan terjadi di perbatasan Kabupaten Sambas adalah ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas.

Sesuai dengan Teori John M Collins, permasalahan OBP dan permasalahan patok batas yang belum terselesaikan memunculkan adanya kemampuan yang menguasai titik lemah permasalahan perbatasan berupa kegiatan pelanggaran wilayah perbatasan.

Selaras dengan permasalahan tapal batas di wilayah Kabupaten Sambas juga menjadi fokus Muhammad Rizki sehingga perlu adanya pembuatan tapal batas secara fisik dan biomana dipandang perlu, maka dibangun tembok pemisah antara Indonesia-Malaysia, untuk daerah perbatasan yang berupa daratan mengingat arti penting secara hukum dan teknis terhadap kehidupan masyarakat yang berdomisili di tapal batas

tersebut. Selain itu pendapat Muradi yang fokus pada pengelolaan pengamanan perbatasan memiliki pandangan bahwa Perbatasan antar-negara ditetapkan melalui garis batas negara, yakni sebuah garis imajiner yang merupakan bagian dari kesepakatan politik.

b. Ancaman Non Militer

Sesuai hasil penelitian bahwa ancaman non militer yang memiliki kemampuan sehingga sulit di hentikan yang terjadi di perbatasan Sambas adalah kegiatan illegal logging, trafficking, pencurian sumber daya alam dan penyelundupan barang dan narkoba.

Merujuk pada Teori John M Collins, permasalahan OBP dan permasalahan patok batas yang belum terselesaikan memunculkan pula adanya kegiatan illegal logging, trafficking, pencurian sumber daya alam dan penyelundupan barang dan narkoba sehingga sulit di hentikan.

Selaras dengan permasalahan tapal batas di wilayah Kabupaten Sambas juga menjadi fokus Muhammad Rizki bahwa persoalan patok batas menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan nasional, antara lain persengketaan pemanfaatan lahan dan administrasi pertanahan, penyelundupan barang dan jasa, lalu lintas barang dan jasa tanpa bea masuk, perkawinan antar negara, infiltrasi pengaruh asing, dan migrasi secara illegal.

4.3.1.2 Aspek Intensitas (*Intension*)

Menurut John M Collins bahwa Intensitas adalah kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha". Jadi intensitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. Perkataan intensitas sangat erat kaitannya dengan motivasi, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Intensitas merupakan realitas dari motivasi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan prestasi, sebab seseorang melakukan usaha

dengan penuh semangat karena adanya motivasi sebagai pendorong pencapaian prestasi.

a. Ancaman Militer

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa ancaman yang paling sering terjadi dengan intensitas tinggi adalah permasalahan patok batas dan pelanggaran wilayah perbatasan.

Merujuk pada Teori John M Collins bahwa secara intensitas permasalahan yang paling sering terjadi terkait patok batas memotivasi negara Malaysia untuk melakukan pelanggaran wilayah terhadap kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan Sambas.

b. Ancaman Non Militer

Ditinjau dari kegiatan yang paling sering terjadi di sepanjang wilayah perbatasan Sambas adalah berbagai kegiatan illegal dan penyelundupan sehingga memunculkan ancaman non militer di wilayah perbatasan Sambas.

Merujuk pada Teori John M Collins bahwa secara intensitas permasalahan yang paling sering terjadi terkait patok batas memotivasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya melakukan berbagai kegiatan-kegiatan illegal dan penyelundupan di wilayah perbatasan Sambas.

Selaras dengan pendapat Muradi dalam jurnal ilmiahnya bahwa infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung lainnya menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya.

4.3.1.3 Aspek Kerentanan (*Vulnerabilities*)

Menurut John M Collins bahwa *Vulnerability* (kerentanan) adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kondisi umum yang mencakup faktor fisik, sosio-ekonomi, politik dan budaya, yang berpotensi menyebabkan sekelompok masyarakat lebih mudah tertimpa bencana, atau yang menghambat kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap bencana.

a. Ancaman Militer

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa masih adanya *blank spot area* di perbatasan Kabupaten Sambas yang menimbulkan kerawanan adanya ancaman pelanggaran wilayah perbatasan di latar belakang permasalahan OBP dan permasalahan patok batas.

Merujuk pada Teori John M Collins bahwa adanya blank spot area di perbatasan Kabupaten Sambas menjadi kerentanan pada faktor fisik, sosio-ekonomi, politik dan budaya, yang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman pelanggaran wilayah.

Selaras dengan pendapat Jamiat yang fokus pada pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas bahwa permasalahan yang paling urgen untuk diatasi adalah jalan dan jembatan, dimana sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor.

b. Ancaman Non Militer

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa wilayah perbatasan Sambas banyak terdapat jalan tikus sehingga rentan sebagai pintu masuknya berbagai kegiatan ilegal dan penyeludupan dari Malaysia ke Indonesia.

Merujuk pada Teori John M Collins bahwa keberadaan banyaknya jalan tikus di sepanjang wilayah perbatasan Sambas dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya kegiatan ilegal dan penyeludupan dan berdampak sulitnya kegiatan ilegal dan penyeludupan dihentikan.

Dari tinjauan hasil penelitian dan merujuk pada evaluasi ancaman pada aspek kemampuan, intensitas dan kerentanan pada pengamanan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas, maka potensi ancaman militer adalah pelanggaran wilayah perbatasan yang dilatar belakangi persoalan patok batas dan *OBP*. Sedangkan ancaman non militer yang berpotensi terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas adalah berbagai kegiatan ilegal seperti pencurian sumber daya alam, *human trafficking*, penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba.

4.3.2 Strategi Pengamanan Perbatasan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas.

Merujuk pada teori Arthur F. Lykke Jr, bahwa strategi sama dengan tujuan (tujuan yang ingin dicapai) ditambah cara (jalannya tindakan) plus sarana (instrumen yang dengannya beberapa tujuan dapat tercapai). Sedangkan Retaired Major General Dennis Laich, AUS The model is known as "ends, ways, and means," where ENDS is WAYS plus MEANS. *Ends are defined as the strategic outcomes or end states desired. Ways are defined as the methods, tactics, and procedures, practices, and strategies to achieve the ends. Means are defined as the resources*

required to achieve the ends, such as troops, weapons systems, money, political will, and time. The model is really an equation that balances what you want with what you are willing and able to pay for it or what you can get for what you are willing and able to pay.

Tujuan didefinisikan sebagai hasil strategis atau keadaan akhir yang diinginkan. Cara didefinisikan sebagai metode, taktik, dan prosedur, praktik, dan strategi untuk mencapai tujuan. Sarana didefinisikan sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, seperti pasukan, sistem senjata, uang, kemauan politik, dan waktu.

4.3.2.1 Tujuan (Ends)

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Sambas adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Merujuk pada Teori Lykke bahwa tujuan adalah "apa" yang harus dicapai atau tujuan adalah apa yang jika dicapai menciptakan, berkontribusi pada pencapaian kondisi akhir yang diinginkan atau yang mendukung tercapainya kepentingan nasional, hal tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Sambas adalah menjaga keamanan perbatasan di lokasi garis batas setempat, mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

4.3.2.2 Pelaksanaan (*Ways*)

Ditinjau dari hasil penelitian bahwa pengamanan perbatasan di wilayah Sambas dilakukan dengan cara menggelar sembilan pos batas yang dilaksanakan oleh 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Batalyon Satgas Pamtas dengan melaksanakan tugas-tugas bidang intelijen, bidang operasi, bidang minlog dan bidang teritorial.

Merujuk pada Teori Lykke bahwa Cara (konsep / tindakan strategis) dalam suatu strategi adalah "bagaimana" tujuan harus dicapai dengan menggunakan sumber daya. Konsep tersebut harus cukup eksplisit untuk memberikan panduan perencanaan kepada mereka yang harus mengimplementasikan dan memanfaatkannya. Karena cara menyampaikan tindakan, mereka sering kali memiliki kata kerja, tetapi cara adalah pernyataan "bagaimana," bukan "apa" dalam kaitannya dengan tujuan strategi. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dilaksanakan saat ini dengan cara menggelar sembilan pos pamtas yang dilakukan oleh 1 SSK dari Batalyon Satgas Pamtas dengan melaksanakan tugas-tugas bidang intelijen, bidang operasi, bidang minlog dan bidang teritorial.

4.3.2.3 Sumber Daya (*Means*)

Ditinjau dari hasil penelitian, bahwa pengamanan perbatasan di wilayah Sambas memanfaatkan sumber daya berupa sarana dan prasarana sesuai indeks dari Mabes TNI berupa tersedianya pos-pos pamtas dengan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pos pengamanan perbatasan.

Merujuk pada Teori Lykke bahwa terkait dengan sarana adalah sumber daya spesifik apa yang harus digunakan dalam menerapkan konsep untuk mencapai tujuan yang terwujud meliputi kekuatan, orang, peralatan, uang, dan fasilitas. Sumber daya tak berwujud mencakup hal-hal seperti "kehendak," keberanian, atau kecerdasan. Hal tersebut sesuai

dengan pemanfaatan sumber daya saat ini dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan di wilayah Sambas berupa sarana dan prasarana sesuai indeks dari Mabes TNI berupa tersedianya pos-pos pamtas dengan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pos perbatasan.

Dari analisis di atas, bahwa strategi pengamanan perbatasan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas memiliki tujuan mengamankan garis perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan konsep yang dilaksanakan saat ini dengan cara menggelar sembilan pos pamtas yang dilaksanakan oleh 1 SSK Pamtas dari Batalyon Satgas Pamtas dengan melaksanakan tugas-tugas bidang intelijen, bidang operasi, bidang minlog dan bidang teritorial, sedangkan sumber daya berupa personel, sarana dan prasarana yang digunakan adalah tersedianya pos-pos pamtas dengan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pos perbatasan sesuai indeks pos pamtas.

Merujuk pada Teori Lykke dan rumusan strategi pertahanan negara Kementerian Pertahanan, bahwa terkait strategi yang tidak efektif, tidak optimal, tidak memenuhi parameter proporsional, seimbang dan terkoordinasi, maka akan menghadapi resiko (*risk*) yaitu sesuatu yang harus ditanggung dan merugikan berupa timbulnya ancaman berupa beberapa kegiatan ilegal, pelanggaran perbatasan, dan lolosnya para pelintas batas ilegal.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berpijak pada hasil penelitian dan deskripsi tentang potensi ancaman dan deskripsi mengenai Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Potensi Ancaman Pada Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas.

Potensi ancaman pada wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas yang merujuk pada evaluasi ancaman pada aspek kemampuan, intensitas dan kerentanan pada pengamanan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas, maka potensi ancaman militer adalah pelanggaran wilayah perbatasan yang dilatar belakangi persoalan patok batas dan OBP. Sedangkan ancaman non militer yang potensi terjadi di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas adalah berbagai kegiatan ilegal, pencurian sumber daya, *human trafficking*, *illegal trading*/penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba.

5.1.2 Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas.

Strategi pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas memiliki tujuan (*ends*) mengamankan garis

perbatasan tersebut, mencegah bergeser atau hilangnya patok batas, mencegah kegiatan ilegal yang memanfaatkan garis batas yang tidak terawasi sebagai pintu keluar/masuk tidak resmi pelintas batas, dalam rangka menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan konsep (*ways*) yang dilaksanakan saat ini dengan cara menggelar sembilan pos pamtas yang dilaksanakan oleh satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns sejumlah 120 personel dengan melaksanakan tugas-tugas bidang Intelijen, bidang Operasi, bidang Minlog dan bidang Teritorial, sedangkan sarana dan prasarana yang digunakan adalah keberadaan pos-pos batas dengan perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pos perbatasan (*means*) sesuai indeks pos pamtas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi strategi di lapangan dikaitkan dengan teori strategi dan rumusan strategi pertahanan negara, dapat dikata strategi belum cukup efektif dan belum optimal karena strategi yang diimplentasikan kurang proporsional, kurang seimbang, dan kurang terkoordinasi dalam *ends*, *ways* dan *means*, sehingga timbul *risk* yaitu banyaknya kegiatan ilegal terjadi di perbatasan darat Indonesia (Sambas)-Malaysia (Sarawak).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, untuk dapat mengoptimalkan pengamanan perbatasan di wilayah Kabupaten Sambas maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Pemerintah Pusat melalui Menteri Luar Negeri agar mempercepat penyelesaian secara bermartabat atas Outstanding

Boundary Problems (OBP) yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.

b. Pemerintah khususnya Kemhan dan TNI agar mengevaluasi dan menata ulang pembangunan pos batas yang sudah digelar saat ini dihadapkan pada banyaknya jalan pendekat yang di luar pemantauan pos pamtas (“jalan tikus”) untuk mengantisipasi ancaman militer dan ancaman non militer.

c. Kodam XII/Tpr sebagai Koops dan Korem 121/Abw sebagai Kolakops Pengamanan Perbatasan di wilayah Sambas agar mengevaluasi terkait program-program dalam kegiatan pengamanan perbatasan yang dapat mewujudkan masyarakat perbatasan sebagai “pagar hidup” dalam menjaga perbatasan dihadapkan panjang wilayah perbatasan dan keterbatasan pos batas yang digelar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Arifin, Saru (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Semarang: Sinar Grafika.
- Bakeri, Samsul. (2012). *Kebijakan*. Jakarta: Pusbin KPK, BPKSDM.
- Batubara, Harmen (2017). *Tapal Batas. Batas Darat RI-Malaysia, Indonesia-PNG, RI-Timor Leste & Masalahnya*. Jakarta: wilayahperbatasan.com.
- Bungin, Burhan (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Clausewitz. (2017). *On War* (Makmur Supriyatno, Brownstone Book) United State (Original work published 1827).
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadarisman. (2012). *Manajemen Pengembangan SDM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda-karya.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noveria, M., Wuryandari, G., Haba, J., Noor, F., Yuliana, Cl., Rucianawati (2017). *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan. Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Partnership Policy Paper No. 2/2011, *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- Prabowo, J. S. (2012). *Desain Pertahanan Negara Aspek Militer*. Jakarta: Pusat pengkajian Strategi Nasional (PPSN)

- Rachmat, A.N. (2015). *Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Cimahi: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Gaol, C.H.R. Jimmy L. (2014). *A to Z, Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia.
- Harsono, Budi. (2016), *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pemeriksaan Pajak di Pusdiklat Pajak*. disertasi, Universitas Negeri Jakarta.
- Rahayu, I & Ardani, T. (2004). *Observasi dan Wawancara*. Malang: Banyu-media.
- Ranjabar, Jacobus (2015). *PERUBAHAN SOSIAL. Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Schermerhorn Jr, J.R., Hunt, J.G., Osborn R.N. dan Bien, M.U. (2010). *Organizational Behavior* . Danvers: John Willey & Sons, Inc.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah. Malang Press.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia* Jakarta: Kemhan RI
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan RI

- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 beserta Lampirannya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41.
- Peraturan Menteri Pertahanan republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tanggal 27 November 2015 tentang Buku strategi pertahanan negara 2015.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Pedoman Kerja Nomor :6758/HK.220/L/7/2016 tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2545 /VIII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 30 Juli 2019

Kepada
Yth. Pangdam XII Tanjungpura
di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diseienggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon Bapak berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Rudy Kasiman NIM 120180101008 untuk melakukan penelitian melalui wawancara (Daftar pejabat terlampir), observasi dan studi dokumen/laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Sinergitas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2019".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rukas1990@gmail.com dan HP 08124802502.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warak III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hidayah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2384/III/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, /6 Juli 2019

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam
lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Rudy Kasiman NIM 120180101008 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Sinergitas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di kabupaten Sambas Tahun 2018-2019".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rukas1990@gmail.com dan HP 08124802502
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warak III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hidayat, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/2384/VII/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Asintel Kasdam XII/Tanjungpura
2. Asops Kasdam XII/Tanjungpura
3. Kapolres Sambas
4. Bupati Sambas
5. Kepala PLBN Aruk di Sambas
6. Kepala Pos Imigrasi PLBN Aruk
7. Kepala Imigrasi Sambas
8. Kepala Imigrasi Pontianak
9. Kabag Perbatasan Setda Kabupaten Sambas
10. Dandim 1202/Singkawang
11. Kepala Balai Karantina di Sambas
12. Kepala Bea Cukai di Sambas
13. Danramil 1202-14, di Sambas

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warak III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hidayah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER XII/TANJUNGPURA

Pontianak, 8 Agustus 2019

Nomor : B/ 1896 /VIII/2019
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Jawaban izin penelitian dalam
rangka penyusunan tesis

Kepada

Yth. Rektor Unhan

di

Jakarta

1. Dasar :

a. Surat Rektor Unhan nomor B/2545/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang permohonan izin penelitian; dan

b. *Pertimbangan komando dan staf Kodam XII/Tanjungpura.*

2. Sesuai dasar di atas, Kodam XII/Tanjungpura mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA 2018/2019 a.n. Rudy Kasiman NIM 120180101008 untuk melaksanakan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen/laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Sinergitas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas TA 2018-2019".

3. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Panglima Kodam XII/Tanjungpura
 Kastaf,



Alif Denny D. Tuejeh
 Brigadir Jenderal TNI

Tembusan :

1. Ijenad
2. Pangdam XII/Tanjungpura
3. Aspers Kasad
4. Danrem 121/Abw
5. Irdam XII/Tanjungpura
6. Para As Kasdam XII/Tanjungpura



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR SAMBAS
Jalan Kartiasa 16, Sambas 79462

Sambas, 13 Agustus 2019

Nomor : B/ *421* /VIII/HUM.5./2019
Klasifikasi: Biasa
Lampiran :-
Perihal : persetujuan ijin Penelitian

Kepada

Yth. Rektor Unhan

di

Jakarta

1. Rujukan surat Rektor Unhan nomor: B/2384/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 hal Permohonan Izin Penelitian;
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan hormat di sampaikan bahwa Polres Sambas tidak berkeberatan menerima mahasiswa program Studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan TA. 2018/2019 atas nama:
Nama : Rudy Kasiman
NIM : 120180101008
Program Studi : Strategi Perang Semesta
3. Untuk melaksanakan penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen di Polres Sambas dalam rangka penyusunan tesis dengan judul " Sinergitas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2019".
4. Demikian untuk menjadi Maklum.

Tembusan:

1. Rektor Unhan.
2. Kasatwas Unhan.
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan
6. Kapolda Kalbar
7. Inwasda Polda Kalbar





BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA
POS LINTAS BATAS NEGARA ARUK

Jalan Raya Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas - Kalimantan Barat
 e-mail: bnppplbnaruk@gmail.com

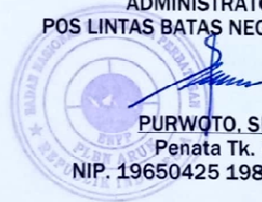
Aruk, 13 Agustus 2019

Nomor	: 011/024/S.KL/PLBN-Aruk/VIII/2019	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth.	Rektor Unhan
Lampiran	: -	Di	
Hal	: Persetujuan Ijin Penelitian	Jakarta	

1. Rujukan surat Rektor Unhan nomor: B/2384/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 hal Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan hormat di sampaikan bahwa PLBN Aruk tidak berkeberatan menerima mahasiswa program Studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan TA. 2018/2019 atas nama:

Nama : Rudy Kasiman
 NIM : 120180101008
 Program Studi : Startegi Perang Semesta
3. Untuk melaksanakan penelitian melalui Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen di PLBN Aruk dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Sinergitas Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Tahun 2018-2019".
4. Demikian untuk menjadi maklum.

ADMINISTRATOR
 POS LINTAS BATAS NEGARA ARUK



PURWOTO, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19650425 198409 1 001

PEDOMAN WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEJABAT KOOPS

Nama Observer : Rudy Kasiman
Tanggal Wawancara :
Nama Narasumber :
Instansi : Makodam XII dan Jajaran
Jabatan : Asintel/Asops/Dansatgas/Dan SSK/Dandim
Status Penelitian : Informan 1/2/3/4/5

1. Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?
2. Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan illegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?
3. Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas illegal dari dan ke Indonesia-Malaysia?
4. Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran/perusakan/penghilangan patok batas negara?
5. Apakah memonitor perkembangan gelar kekuatan militer Malaysia di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dan mohon dijelaskan data-data yang tercatat?
6. Apakah ditemukan kegiatan-kegiatan secara terbuka militer Malaysia di wilayah perbatasan Sambas-Malaysia?
7. Apakah ada kegiatan Operasi Intelijen Malaysia di perbatasan darat Sambas-Malaysia?

8. Apakah ada hakekat ancaman pada aktivitas pasukan TDM dan Intelijen Malaysia di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia?
9. Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal?
10. Apakah Satgas Pamtas yang ada saat ini mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar Indonesia?
11. Tugas apa saja yang diberikan kepada Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, baik tugas OMP ataupun tugas OMSP?
12. Apakah Satgas Pamtas dapat berperan untuk melaksanakan tugas pembinaan territorial dalam rangka membantu mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, misalnya membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun sebagai penyuluh dalam pertanian dan peternakan?
13. Dengan rentang jarak garis batas yang cukup panjang di perbatasan darat Sambas-Malaysia, apakah kekuatan personel dan peralatan Satgas Pamtas sudah memadai dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan terhadapnya?
14. Berapakah jumlah personel Satgas Pamtas yang proporsional di Pos-pos Pamtas darat Sambas-Malaysia agar dapat menjalankan tugas secara optimal?
15. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa jumlah Pos Pamtas yang digelar di perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia pada tahun 2018 sebanyak 8 Pos, apakah jumlah tersebut telah memadai atau perlu ditingkatkan jumlahnya? Berapa jumlah pos yang ideal untuk mengamankan

rentang perbatasan darat Sambas-Malaysia yang membentang sepanjang 97 km tersebut?

16. Berapakah jumlah personel yang ideal pada setiap pos agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif?

17. Apakah ada rencana penambahan gelar Pos Pamtas baru supaya mampu mengamankan wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, yang digolongkan *blank spot area* dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan illegal di sana?

18. Apakah Satgas Pamtas di sepanjang perbatasan darat Sambas-Malaysia mendapat penekanan khusus dalam mengawasi daerah perbatasan di titik OBP (*Outstanding Border Problem*)?

19. Apakah tersedia dan siap operasional dalam hal sarana dan prasarana pendukung pada pelaksanaan tugas pokok pengamanan perbatasan darat Sambas-Malaysia?

20. Apakah kondisi Pos-Pos Pamtas setempat masih layak dan memadai untuk ditempati oleh anggota Satgas?

21. Apakah Alkap, penerangan, dan air bersih cukup tersedia dalam mendukung tugas pengamanan?

22. Apakah sarana transportasi untuk patroli dan pengadaan/distribusi logistik tersedia dan memadai?

23. Bagaimana sinergi Satgas Pamtas dengan para pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat setempat? Apakah dalam Operasi Pamtas didukung oleh SOP bersama antara para pemangku kepentingan dalam pengamanan perbatasan tersebut?

24. Bagaimana hubungan antara Satgas Pamtas dengan Pemerintah Daerah Sambas? Apakah Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Pemda Sambas?

25. Apakah ada program bersama antara Pemda Sambas dengan Satgas dalam pembangunan fisik dan non fisik masyarakat perbatasan?
26. Bagaimana hubungan Satgas Pamtas dengan masyarakat setempat? Apakah masyarakat menerima dan mendukung eksistensi Satgas?
27. Bagaimana kerjasama antara Satgas Pamtas Indonesia dengan Satgas Pamtas TDM (*Tentara Diraja Malaysia*)?
28. Apakah kerjasama yang sudah terbangun selama ini berpengaruh signifikan secara strategis dan taktis terhadap pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan tersebut di atas?
29. Apakah keberadaan Pos Gabungan Bersama dapat membangun komunikasi, kerjasama dan kepercayaan antara kedua negara?
30. Apakah masih perlu penambahan Pos Gabungan Bersama antara Satgas Pamtas Indonesia dengan Satgas Pamtas Malaysia?

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEJABAT TERKAIT

Nama Observer : Rudy Kasiman
Tanggal Wawancara :
Nama Narasumber :
Instansi : Kantor terkait
Jabatan : Bupati/ Kapolres/Kanim/Ka PLBN/ Ka UPT /Tomas
Status Penelitian : Informan 6/7/8/9/10/11/12

1. Menurut pendapat Bapak, bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?
2. Menurut pendapat Bapak, apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan illegal seperti *illegal logging*, *illegal mining*, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?
3. Menurut pendapat Bapak, apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia?
4. Menurut pendapat Bapak, apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran/perusakan/penghilangan patok batas negara?
5. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas Darat yang ada sebanyak delapan Pos dengan jumlah personel 105 orang, dapat melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia secara optimal?
6. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas TNI yang bertugas di perbatasan Sambas-Malaysia, memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar?

7. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas dapat diberi peran untuk membantu mengatasi kesulitan Pemerintah dan masyarakat di wilayah perbatasan, seperti membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan atau menjadi penyuluh dalam bidang pertanian dan peternakan?
8. Menurut pendapat Bapak, apakah kekuatan personel dan peralatan Satgas Pamtas sudah memadai dan efektif untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibeban kepada mereka bila dikaitkan dengan rentang panjangnya garis batas yang cukup panjang di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia?
9. Menurut pendapat Bapak, apakah Bapak memahami dan mengetahui tentang adanya daerah perbatasan darat Sambas-Malaysia yang masih menjadi persoalan bersama dengan Malaysia yaitu titik *OBP (Outstanding Border Problem)*?
10. Menurut pendapat Bapak, apakah Bapak mengetahui adanya indikasi upaya Malaysia untuk menguasai titik *OBP* tersebut melalui kegiatan tertentu di sekitar *OBP* tersebut?
11. Menurut pendapat Bapak, apakah penempatan Pos-Pos Pamtas yang ada saat ini sudah memberikan rasa aman?
12. Menurut pendapat Bapak, tentang kerja sama Satgas Pamtas dengan komponen masyarakat lainnya, apakah dalam pelaksanaan tugas pengamanan didukung oleh *SOP* bersama antara para pemangku kepentingan lainnya dalam pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia?
13. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas dapat melaksanakan tugas mencegah berbagai tindakan ilegal di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia seperti *illegal logging*, *illegal mining*, penyeludupan miras, narkoba dan sebagainya?

14. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku serta tidak melanggar hukum?
15. Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan antara Satgas Pamtas dengan Pemda, Kecamatan dan Pempdes, apakah didukung oleh Pemerintah setempat?
16. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas selalu berkoordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan lainnya tentang permasalahan yang terjadi di perbatasan?
17. Menurut pendapat Bapak, apakah ada program bersama antara Pemda Sambas dengan Satgas Pamtas dalam pembangunan fisik dan non fisik masyarakat perbatasan?
18. Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan Satgas Pamtas dengan masyarakat setempat? Apakah masyarakat menerima dan mendukung eksistensi Satgas?
19. Dengan keterbatasan Pemerintah Pusat membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, menurut pendapat Bapak, apakah membuat masyarakat kurang percaya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan kurang mencintai NKRI?
20. Menurut pendapat Bapak, bagaimana hubungan Satgas Pamtas dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda setempat? Apakah komunikasi sosial berjalan dan terbangun dengan baik?
21. Menurut pendapat Bapak, apakah dengan ketergantungan ekonomi kepada Malaysia di perbatasan Sambas-Serawak mempengaruhi rasa nasionalisme masyarakat setempat?
22. Menurut pendapat Bapak, apakah Pemerintah Malaysia sering melakukan propaganda tentang kelemahan Indonesia melalui siaran radio, televisi, surat kabar atau melalui masyarakat Malaysia?

23. Menurut pendapat Bapak, apakah eksistensi Satgas Pamtas dapat mempengaruhi menguatnya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Sambas-Serawak?
24. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kerjasama antara Satgas Pamtas Indonesia dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas dengan Satgas Pamtas TDM (*Tentara Diraja Malaysia*) dan pemangku kepentingan Malaysia?
25. Menurut pendapat Bapak, apakah diperlukan untuk menempatkan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pengamanan di tiap Pos Pamtas yang tersebar di sepanjang perbatasan?

Transkrip Wawancara

KOOPS PAMTAS KODAM XII/TPR PONTIANAK	
Narasumber : Bapak Kolonel Inf Wulang Nur Yudhanto	
Jabatan : Asintel Kasdam XII/Tpr	
Waktu : Kamis, 08 Agustus 2019	
1.	Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme? Situasi di wilayah Kabupaten Sambas sampai dengan saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif serta tidak ada indikasi akan terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh unsur SARA, radikalisme dan terorisme.
2.	Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu? Masih, di wilayah Kabupaten Sambas-Malaysia sampai dengan saat ini masih adanya kegiatan ilegal dan penyeludupan.
3.	Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia? Masih, di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak terjadi pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia.
4.	Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran patok/perusakan/ penghilangan patok batas negara? Sampai dengan saat ini tidak terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas baik berupa pergeseran/perusakan/ penghilangan patok batas. Namun pernah terjadi pada tahun 2017 di Area I (A-C) Pilar A-73 s.d. A-79 di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas-Malaysia
5.	Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal? Terlaksana kegiatan pengamanan secara optimal karena adanya kerjasama antara Satgas Pamtas Indonesia dengan satgas pamtas TDM di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia.
6.	Apakah Satgas Pamtas yang ada saat ini mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar Indonesia? Satgas Pamtas sudah mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari dalam atau luar negeri.
7.	Tugas apa saja yang diberikan kepada Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, baik tugas OMP ataupun tugas OMSP? Tugas OMP antara lain menjaga perbatasan wilayah NKRI dan Malaysia,

	menjaga kedaulatan NKRI. Untuk OMSP antara lain melaksanakan kegiatan binter dengan masyarakat di wilayah perbatasan, melaksanakan pengamanan wilayah dengan mengadakan <i>sweeping</i> dalam rangka mengantisipasi tindakan ilegal, berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam setiap pelaksanaan tugas.
8.	<p>Apakah Satgas Pamtas dapat berperan untuk melaksanakan tugas pembinaan territorial dalam rangka membantu mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, misalnya membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun sebagai penyuluh dalam pertanian dan peternakan?</p> <p>Satgas Pamtas selain melaksanakan tugas pokok juga berperan membantu pemerintah khususnya di wilayah Sambas seperti membangun infrastruktur dan karya bakti kepada masyarakat.</p>
9.	<p>Bagaimana cara kodam XII mengamankan perbatasan di Kabupaten Sambas?</p> <p>Pengamanan perbatasan dilaksanakan dengan cara menggelar pos pos diperbatasan yang tujuannya adalah mengantisipasi untuk mengatasi ancaman yang timbul baik ancaman militer dan non militer</p>
10.	<p>Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kabupaten Sambas?</p> <p>Selain ancaman pelanggaran batas maka ancaman lain berasal dari beberapa kegiatan yang dilakukan di wilayah perbatasan. Contoh dari kegiatan tersebut adalah illegal logging, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan. Kegiatan tersebut sulit untuk dihentikan sehingga dibutuhkan perhatian serta penanganan yang serius dari korps Pamtas Kodam XII/Tpr</p>
11.	<p>Menurut data yang ada pelanggaran apa yang sering terjadi pada perbatasan wilayah di kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran yang memiliki intensitas yang tinggi adalah pelanggaran wilayah dan masuknya kelompok atau jaringan teroris dari wilayah malaysia</p>
12.	<p>Menurut pendapat Bapak, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran wilayah kebanyakan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari malaysia maupun masyarakat perbatasan indonesia yang membantu kegiatan tersebut yang didorong oleh keadaan ekonomi dan sosial masyarakat indonesia tersebut</p>

POS KOKI SSK II Sajingan Terpadu	
Narasumber	: Bapak Fransiskus Kaping
Jabatan	: Kepala Dusun Aruk
Waktu	: Kamis, 13 Agustus 2019
1.	Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA,

	<p>radikalisme/terorisme?</p> <p>Begini Pak, saya jawab buka, di sini belum ada terjadi, karena kita, kita tuh mengingat, kita tuh seringkali sosialisasi tentang, ini kan kita Dusun Aruk Desa Sebunga. Desa Sebunga menjadi harapan kita, maju ke depan seperti apa? Kita di sini bersepakat bagaimana kerjasama yang baik dengan TNI, Kita dukung, berarti kalau kita tidak dukung TNI, nanti Bhineka Tunggal Ika jadi luntur nanti, ya. Itu bingkai kita ya. Di sini contohnya, kita di Biawak nih kan sinergi tadi, cerita lamanya nih apa contohnya Aruk. Aruk ini Aku Rela Untuk Korban. Korban inilah. Contoh pos inilah. Pos dulu 642, saya yang bangunnya Pak. Kerjasama dengan TNI. Tidak ada bosan-bosannya. Kita begitu kerjasama. Cuma...satu apakah keliru atau tidak, ini saya tanya ya Pak. Ini ke depan nanti, kita jangan berpisah ya, ya jangan berpisah. Walaupun ikan di laut, asam di darat, ketemu periuk, kual, ketemu juga budi dan bahasa. Kan begitu...kita ini kerjasama yang baik Pak. Satu contoh.....komandan, bagaimana terjadinya, tapi narkoba belum pernah Pak. Yang kita jaga bersama Pak. Karena begini, desa Sebunga ini tiga faktor...Desa Sebunga biasa, Desa Sebunga Mandiri, Desa Sebunga Harapan, Desa Sebunga Siaga. Hati-hatilah yang narkoba. Belum ada. Saya kemaren ada waktu itu adalah, ada menyaksikan, tangkapan yang begitu itu, mereka itu begini ya Pak, yang keluar di sini tuh. Jangan sampai melepaskan orang sini untuk menjaga perbatasan Pak. Di sini perlu dibina adalah siskamling dan apa ke depan nanti supaya kita tuh menjadi harapan Pak. Jadi anak-anak muda nih jangan ditinggalkan, seperti contoh.</p>
--	--

KOOPS PAMTAS KODAM XII/TPR PONTIANAK	
Narasumber	: Bapak Kolonel Inf Fredy Sianturi
Jabatan	: Asops Kasdam XII/Tpr
Waktu	: Kamis, 08 Agustus 2019
1.	<p>Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?</p> <p>Situasi di wilayah Kabupaten Sambas sampai dengan saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif serta tidak ada indikasi akan terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh unsur SARA, radikalisme dan terorisme.</p>
2.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?</p> <p>Masih, di wilayah Kabupaten Sambas-Malaysia sampai dengan saat ini masih adanya kegiatan ilegal dan penyeludupan.</p>
3.	Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak

	<p>pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia? Masih, di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak terjadi pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia.</p>
4.	<p>Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran patok/perusakan/ penghilangan patok batas negara? Sampai dengan saat ini tidak terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas baik berupa pergeseran/perusakan/ penghilangan patok batas. Namun pernah terjadi pada tahun 2017 di Area I (A-C) Pilar A-73 s.d. A-79 di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas-Malaysia</p>
5.	<p>Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal? Terlaksana kegiatan pengamanan secara optimal karena adanya kerjasama antara Satgas Pamtas Indonesia dengan satgas pamtas TDM di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia.</p>
6.	<p>Apakah Satgas Pamtas yang ada saat ini mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar Indonesia? Satgas Pamtas sudah mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari dalam atau luar negeri.</p>
7.	<p>Tugas apa saja yang diberikan kepada Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, baik tugas OMP ataupun tugas OMSP? Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwasanya tugas pengamanan perbatasan merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang yang di dalamnya termasuk mengamankan wilayah perbatasan dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan, selain itu Satgas Pamtas juga ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas.</p>
8.	<p>Apakah Satgas Pamtas dapat berperan untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial dalam rangka membantu mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, misalnya membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun sebagai penyuluh dalam pertanian dan peternakan? Satgas Pamtas selain melaksanakan tugas pokok juga berperan membantu pemerintah khususnya di wilayah Sambas seperti membangun infrastruktur dan karya bakti kepada masyarakat.</p>
9.	<p>Bagaimana cara kodam XII mengamankan perbatasan di Kabupaten Sambas? Pengamanan perbatasan dilaksanakan dengan cara menggelar pos pos di perbatasan yang tujuannya adalah mengantisipasi untuk mengatasi ancaman yang timbul baik ancaman militer dan non militer</p>
10.	<p>Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di wilayah perbatasan</p>

	<p>khususnya di wilayah kabupaten Sambas?</p> <p>Selain ancaman pelanggaran batas maka ancaman lain berasal dari beberapa kegiatan yang dilakukan di wilayah perbatasan. Contoh dari kegiatan tersebut adalah illegal logging, perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan. Kegiatan tersebut sulit untuk dihentikan sehingga dibutuhkan perhatian serta penanganan yang serius dari korps Pamtas Kodam XII/Tpr</p>
11.	<p>Menurut data yang ada pelanggaran apa yang sering terjadi pada perbatasan wilayah di kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran yang memiliki intensitas yang tinggi adalah pelanggaran wilayah dan masuknya kelompok atau jaringan teroris dari wilayah Malaysia</p>
12.	<p>Menurut pendapat Bapak, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran wilayah kebanyakan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari Malaysia maupun masyarakat perbatasan Indonesia yang membantu kegiatan tersebut yang didorong oleh keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia tersebut</p>

<p>Narasumber : Bapak Letnan Kolonel Kav Viktor Jabatan : Dandim 1202/Singawang Kodam XII/Tpr Waktu : Selasa, 13 Agustus 2019</p>	
1.	<p>Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?</p> <p>Sampai dengan saat ini situasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas kondusif dan aman tidak ada terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme.</p>
2.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?</p> <p>Kegiatan ilegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba masih sering terjadi. Peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Sambas sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi.</p>
3.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia?</p> <p>Pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak terjadi.</p>

4.	<p>Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran patok/perusakan/ penghilangan patok batas negara?</p> <p>Sampai dengan saat ini tidak terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas baik berupa pergeseran/perusakan/ penghilangan patok batas</p>
5.	<p>Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal?</p> <p>Tugas pengamanan dapat terlaksana secara optimal karena adanya sinergitas dengan aparat pemerintah yang berada di perbatasan yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (C/QS), selain dengan C/QS saat ini terdapat Pos Gabungan Bersama (Gabma) yang diisi personel Satgas Pamtas dan TDM sehingga dapat memudahkan untuk berkoordinasi dalam menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas.</p>

<p>Narasumber Jabatan Waktu</p>	<p>: Bapak Mayor Inf Dwi Agung Prihanto : Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns : Minggu, 11 Agustus 2019</p>
1.	<p>Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?</p> <p>Sampai dengan saat ini situasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas kondusif dan aman tidak ada terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme.</p>
2.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?</p> <p>Masih, sampai dengan 4 bulan Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bertugas melaksanakan operasi pamtas Indonesia-Malaysia khususnya di wilayah Kabupaten Sambas masih sering terjadi <i>illegal logging, illegal mining</i>, penyeludupan miras, penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba, sedangkan untuk peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Sambas sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi.</p>
3.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia?</p> <p>Masih, di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak terjadi pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia.</p>
4.	<p>Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran patok/perusakan/ penghilangan patok batas negara?</p> <p>Sampai dengan saat ini tidak terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas baik berupa pergeseran/perusakan/ penghilangan</p>

	patok batas.
5.	<p>Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal?</p> <p>Tugas pengamanan dapat terlaksana secara optimal karena adanya sinergitas dengan aparat pemerintah yang berada di perbatasan yaitu Bea Cukai, Karantina, Imigrasi dan Keamanan (CIQS), selain dengan CIQS saat ini terdapat Pos Gabungan Bersama (Gabma) yang diisi personel Satgas Pamtas dan TDM sehingga dapat memudahkan untuk berkoordinasi dalam menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas.</p>
6.	<p>Apakah Satgas Pamtas yang ada saat ini mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam ataupun dari luar Indonesia?</p> <p>Satgas Pamtas sudah mempunyai daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari dalam atau luar negeri.</p>
7.	<p>Tugas apa saja yang diberikan kepada Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, baik tugas OMP ataupun tugas OMSP?</p> <p>Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwasanya tugas pengamanan perbatasan merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang yang di dalamnya termasuk mengamankan wilayah perbatasan dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan, selain itu Satgas Pamtas juga ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas.</p>
8.	<p>Apakah Satgas Pamtas dapat berperan untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial dalam rangka membantu mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, misalnya membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun sebagai penyuluh dalam pertanian dan peternakan?</p> <p>Dapat karena seluruh personel Satgas Pamtas mempunyai bermacam-macam spesialisasi, ada yang berkemampuan sebagai tukang sehingga dapat memperbaiki infrastruktur yang rusak di wilayah sekitar pos pamtas, personel yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan membuka pelayanan pos kesehatan di seluruh pos pamtas dan dibuka 24 jam non stop bahkan personel Satgas Pamtas juga melayani khitanan serta mampu menyelenggarakan sunatan masal dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, personel yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di perbatasan, serta personel Satgas Pamtas juga memberikan penyuluhan di bidang pertanian dengan cara membuka lahan mati untuk ditanami.</p>
9.	<p>Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran yang sering terjadi diantaranya adalah illegal logging,</p>

	perdagangan manusia, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan.
10.	<p>Menurut data yang ada pelanggaran apa yang sering terjadi pada perbatasan wilayah di kabupaten Sambas?</p> <p>Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dengan intensitas tertinggi adalah ditemukannya pergeseran batas serta pelanggaran wilayah perbatasan lainnya.</p>
11.	<p>Menurut pendapat bapak faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan kabupaten sambas?</p> <p>Saat ini faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran diperbatasan kemungkinan besar disebabkan oleh persoalan patok batas dan permasalahan <i>Outstanding Boundary Problem (OBP)</i></p>

<p>Narasumber : Bapak Lettu Inf Oki Abri Maestro Jabatan : Dan SSK II Yonif Mekanis 643/Wns Waktu : Senin, 12 Agustus 2019</p>	
1.	<p>Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme?</p> <p>Sampai dengan saat ini situasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas kondusif dan aman tidak ada terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme.</p>
2.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu?</p> <p>Masih, sampai dengan 4 bulan Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/Wns bertugas melaksanakan operasi pamantas Indonesia-Malaysia khususnya di wilayah Kabupaten Sambas masih sering terjadi <i>illegal logging, illegal mining</i>, penyeludupan miras, penyeludupan sembako dan penyeludupan narkoba, sedangkan untuk peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Sambas sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi.</p>
3.	<p>Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia?</p> <p>Masih, di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak terjadi pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia.</p>
4.	<p>Apakah masih terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas seperti pergeseran patok/perusakan/penghilangan patok batas negara?</p> <p>Sampai dengan saat ini tidak terjadi pelanggaran kedaulatan negara di Kabupaten Sambas baik berupa pergeseran/perusakan/penghilangan patok batas. Namun pernah terjadi pada tahun 2017 di Area I (A-C) Pilar A-73 s.d. A-79 di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas-Malaysia</p>
5.	<p>Pelaksanaan pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-</p>

	<p>Malaysia dilaksanakan oleh Satgaspamtas darat yang ada saat ini. Menurut pendapat Bapak, apakah Satgas Pamtas tersebut dapat melaksanakan tugas pengamanan secara optimal?</p> <p>Tugas pengamanan dapat terlaksana secara optimal karena adanya sinergitas dengan aparat pemerintah yang berada di perbatasan yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS), selain dengan CIQS saat ini terdapat Pos Gabungan Bersama (Gagma) yang diisi personel Satgas Pamtas dan TDM sehingga dapat memudahkan untuk berkoordinasi dalam menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kabupaten Sambas.</p>
6.	<p>Tugas apa saja yang diberikan kepada Satgas Pamtas dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, baik tugas OMP ataupun tugas OMSP?</p> <p>Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwasanya tugas pengamanan perbatasan merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang yang di dalamnya termasuk mengamankan wilayah perbatasan dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan, selain itu Satgas Pamtas juga ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan khususnya Kabupaten Sambas.</p>
7.	<p>Apakah Satgas Pamtas dapat berperan untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial dalam rangka membantu mengatasi kesulitan Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan darat Sambas-Malaysia, misalnya membantu membangun infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan maupun sebagai penyuluh dalam pertanian dan peternakan?</p> <p>Dapat karena seluruh personel Satgas Pamtas mempunyai bermacam-macam spesialisasi, ada yang berkemampuan sebagai tukang sehingga dapat memperbaiki infrastruktur yang rusak di wilayah sekitar pos pamtas, personel yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan membuka pelayanan pos kesehatan di seluruh pos pamtas dan dibuka 24 jam non stop bahkan personel Satgas Pamtas juga melayani khitanan serta mampu menyelenggarakan sunatan masal dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, personel yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di perbatasan, serta personel Satgas Pamtas juga memberikan penyuluhan di bidang pertanian dengan cara membuka lahan mati untuk ditanami.</p>

8.	<p>Apa saja tugas yang diberikan kepada Satuan Bapak?</p> <p>Pertama, tugas untuk bidang intelijen yaitu melaksanakan pemantauan terhadap lintas batas, bekerja sama dengan Kantor Imigrasi PLBN Aruk; melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan illegal di jalan garis perbatasan, hutan, dan jalan yang menghubungkan RI & Malaysia bersama Kepala PLBN Aruk/PLB Temajuk serta dinas Bea Cukai; menempatkan aparat Intel di titik-titik rawan kegiatan illegal bekerja sama dengan satuan intel setempat; melaksanakan pemantauan TKI yang dideportasi dari Malaysia. Kedua, tugas untuk bidang operasi yaitu: melaksanakan patrol pengamanan patok batas negara; melaksanakan patrol gabungan TNI dan TDM; melaksanakan pengamanan pos perbatasan; melaksanakan pemantauan kegiatan di PLB; melaksanakan sweeping darat kapal dan pengendapan; mengikuti berbagai giat olahraga; menjadi panitia berbagai kegiatan TNI dan Pemerintah Daerah; membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Polri dalam berbagai kegiatan. Ketiga, tugas untuk bidang Minlog yaitu: mengajukan bekal sesuai kebutuhan; mengajukan suku cadang dan baterai ke Komando Atas sesuai dengan kebutuhan; melaksanakan perawatan dan pengecekan terhadap randis setiap saat; mendistribusikan bekal kelas ke Pos Jajaran. Keempat, tugas untuk bidang Teritorial yaitu: melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah sekitar Pos; kegiatan olahraga bersama masyarakat di sekitar Pos; menjadi Pembina upacara bendera di sekolah; melaksanakan karya bhakti; membangun sarana ibadah; memberi materi wawasan kebangsaan dan bela negara; melaksanakan komsos melalui anjungsana ke Tokoh Agama, Masyarakat dan Adat; ikut serta dalam kegiatan pelayanan kesehatan setempat di Kabupaten Sambas.”</p>
-----------	--

BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN SETDA KABUPATEN SAMBAS	
Narasumber	: Husnadi, S.T., M.M.
Jabatan	: Kepala Bagian
Waktu	: Senin, 12 Agustus 2019
1.	<p>Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kabupaten Sambas?</p> <p>Pelanggaran yang terjadi di kabupaten Sambas adalah berupa penyelundupan barang ilegal seperti sembako, narkoba dll dan masih terjadinya perdagangan manusia.i.</p>
2.	<p>Menurut data yang ada pelanggaran apa yang sering terjadi pada perbatasan wilayah di kabutapen Sambas?</p> <p>Pelanggaran di wilayah perbatasan dengan intensitas tertinggi adalah penyelundupan barang ilegal berupa sumberdaya alam, sembako, narkoba dan lain-lainnya. Kegitan pemantauan tersebut dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kabupaten Sambas</p>

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR SAMBAS	
Narasumber : AKBP Permadi Syahids Putra, S.Ik., M.H. Jabatan : Kapolres Sambas Waktu : Senin, 12 Agustus 2019	
1.	Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kabupaten Sambas? Persoalan yang paling sering ditangani oleh Polres Sambas adalah pelanggaran dalam bentuk penebangan pohon yang liar, penyelundupan bahan bahan sumberdaya alam, penyelundupan manusia dan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia.
2.	Menurut pendapat Bapak faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas sulit untuk diatasi? Pelanggaran di wilayah Sambas sulit dihentikan karena adanya dorongan dari faktor ekonomi sehingga para pelanggar selalu mencari celah. Baik pelanggar dari luar dan dalam Indonesia.

POS LINTAS BATAS NEGARA ARUK ARUK, SEBUNGA	
Narasumber : R. MUHAMMAD UMAR K.N., S.IP, M.SI Jabatan : Kepala Pos Imigras PLBN Aruk Waktu : Rabu, 10 Oktober 2018	
1.	Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas-Malaysia masih sering terjadi pelanggaran berupa kegiatan ilegal seperti illegal logging, illegal mining, penyeludupan miras, penyeludupan sembako, penyeludupan narkoba dan peredaran uang palsu? Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas sesuai tupoksinya memfokuskan pada kegiatan perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui jalur yang resmi yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
2.	Apakah di wilayah perbatasan darat Kabupaten Sambas masih marak pelintas batas ilegal dari dan ke Indonesia-Malaysia? Menurut saya, masih terdapat pelintasan ilegal.
3.	Bagaimana situasi di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, apakah terjadi gangguan keamanan seperti konflik sosial yang disebabkan SARA, radikalisme/terorisme? Sejauh ini tidak ada konflik sosial maupun SARA yang terjadi di wilayah perbatasan..
4.	Menurut pendapat Bapak apakah SatgasTNI yang bertugas di perbatasan Sambas-Malaysia, memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar? Menurut saya mampu, namun sebaiknya lebih diperkuat.

Lampiran 5

DOKUMEN PENDUKUNG/DOKUMENTASI

Memohon izin kepada Pangdam XII selaku Pangkoops Pamantas Kodam XII/Tpr Mayjen TNI Herman Asaribab untuk mengadakan penelitian di Koops Pamantas Kodam XII/Tpr



Wawancara dengan Asintel Kasdam XII selaku Asintel Koops Pamantas



Wawancara dengan Rektor Universitas Panca Bhakti selaku Tokoh Masyarakat yang mengenali Sambas secara mendalam



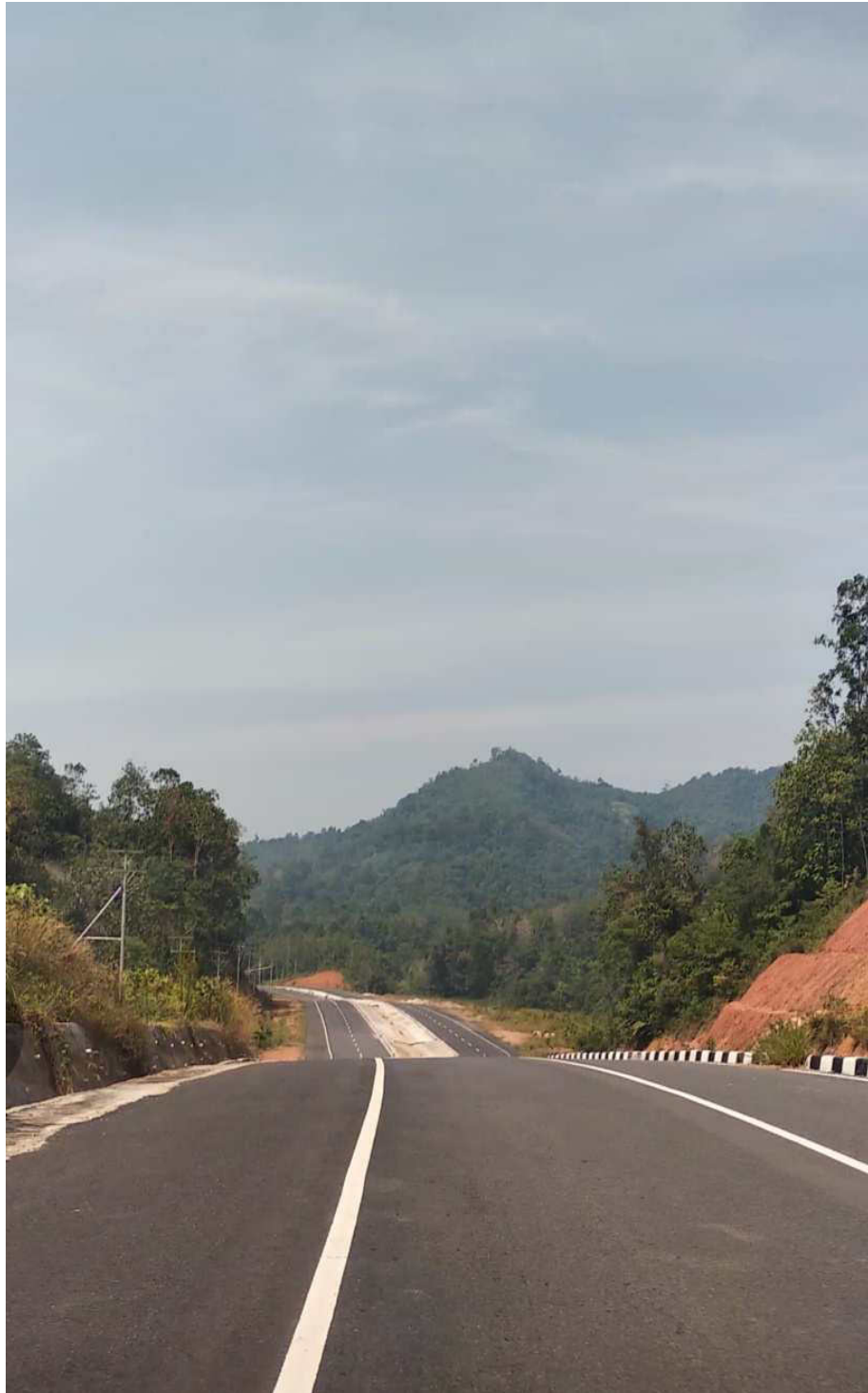
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas yang berdekatan dengan tapal batas dan PLBN Aruk



Wawancara dengan Bupati Sambas di Kantor Bupati Sambas



Wawancara dengan Kepala Kepolisian Resor Sambas



Jalan yang sudah mulus dari Sambas menuju PLBN Aruk



Memasuki kawasan Aruk



Mendekati ke arah pintu gerbang PLBN Aruk



Mengumpulkan kuesioner dan wawancara dengan Komandan SSK di Pos Pamtas Temajuk, Kecamatan Paloh



Mengumpulkan kuesioner dan wawancara dengan Komandan Pos Pamtas Camar Bulan di Pos Pamtas Camar Bulan, Kecamatan Paloh



Mengumpulkan kuesioner dan wawancara dengan Komandan Pos
Pamtas Sei Bening, Kecamatan Sajingan Besar



Mengumpulkan kuesioner dan wawancara dengan Komandan Pos Pamtas Sei Tengah di Ruang Data Pos Pamtas Sei Tengah, Kecamatan Sajingan Besar.



Wawancara dengan Kepala PLBN Aruk, Perwakilan Kepabean, Perwakilan Imigrasi dan Perwakilan Balai Karantina di PLBN Aruk



Wawancara dengan Dandim 1202/Singkawang selaku Dansatgaster Pamtas Kabupaten Sambas bertempat di Makodim 1202 Singkawang



Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)
dari Aruk menuju Temajuk



Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)
dari Aruk menuju Temajuk



Ikon Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia di Aruk yang megah

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Rudy Kasiman, lahir di Majalengka pada 16 September 1967. Anak ke-2 dari pasangan Bapak Maman Suparman dan Ibu Hj. Naseat Rohayati. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri IV Jatiwangi lulus tahun 1981, SMP Negeri I Jatiwangi lulus tahun 1984, SMA Negeri Jatiwangi lulus tahun 1987, Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Putra Surabaya lulus tahun 1997, melanjutkan program Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2018.

Peneliti saat ini bekerja sebagai Perwira TNI AD, sekarang menjabat Pamen Denma Mabesad dalam rangka pendidikan beasiswa Program S2 di Unhan. mengawali karir sebagai Danton di Yonif 507/BS Kodam V/Brawijaya pada tahun 1991, sebagai Kasipers Yonif 507/BS pada tahun 1996, sebagai Komandan Kompi Senapan A di Yonif 512 Malang pada tahun 1997, selanjutnya menjabat Pasiops Kodim 0819 Pasuruan.

Peneliti masih aktif sebagai Perwira Menengah TNI AD, yang mengawali karir Perwira Menengahnya pada tahun 2000. Jabatan-jabatan yang pernah diemban sejak menjadi Pamen, meliputi: Kasipers Bagum, Kasi Binsat Bagjianbang, Wadan Dodik Belanegara Rindam XVII, Pgs Kasmin Pangdam XVII, Kasi Sisfomin Infolahadam XVII, Pgs Kainfolahadam XVII, Gumil Gol V Deppengter Pusdikter Pusterad, Dandim 1005/Marabahan, Wairdam VI/MIw, Sekretaris Babinminvetcaddam VI/MIw, Kepala Babinminvetcaddam XII/Tpr dan Staf Ahli Pangdam XII/Tpr Bidang OMSP.

Berbagai pendidikan militer yang pernah diikuti, yaitu: Akmil lulus pada tahun 1990, Kursus Dasar Kecabangan Infanteri, *AMF & ROBC Infantry* pada 1992 di Australia, Suslapa I, *CTC & AOIC* pada tahun 1995 di Singapura, *Legal Aspect of Combating Corruption Course* pada tahun 2014 di Amerika Serikat, *Cyber Law and Emerging Technology Workshop* pada tahun 2016 di Sidney-Australia, KKLN pada tahun 2019 di Canberra Australia. Pengalaman penugasan antara lain: Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1993, Operasi Pam Rahwan di Papua tahun 2000, Operasi MONUC PBB tahun 2003-2004.

Artikel yang pernah ditulis, dimuat dalam Majalah Gema Infanteri pada tahun 1997 dengan judul: "Optimalisasi Kemampuan Spesialisasi Navigasi Darat Bagi Prajurit Infanteri" dan menjadi Juara II lomba Karangan Militer bagi Golongan Pama Infanteri.

Menikah dengan Dianty Grace Rachman pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta, dikarunia 2 orang anak: Daffa Naufal Rachman dan Dyandra Nabila Rachman.